

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Umum

ALenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyebutkan bahwa<sup>1</sup>:

*“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.*

Alenia tersebut mengamanatkan agar bangsa Indonesia terlibat dalam **melaksanakan ketertiban dunia** yang berdasarkan **kemerdekaan, perdamaian abadi** dan **keadilan sosial**. Hal ini tidak terlepas dari pengalaman sejarah bangsa Indonesia yang pernah mengalami nasib yang sangat menderita, kemudian dapat bangkit dan berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita merasa bangga sebagai bangsa Indonesia dan peduli untuk berjuang mensukseskan pembangunan, baik di dalam negeri maupun dalam kancah politik global.

Terkait dengan hal itu, Indonesia selalu berusaha terlibat aktif dalam proses interaksi dengan negara-negara di dunia. Dengan mengusung tema Politik Luar Negeri (polugri) Bebas Aktif, Indonesia berupaya memainkan perannya di dunia Internasional. Situasi dan kondisi politik internasional yang sangat dinamis telah mendorong para pengambil keputusan Indonesia untuk mengikutinya dengan seksama agar Indonesia tetap dapat memainkan perannya secara signifikan.

---

<sup>1</sup>Lebih lanjut lihat Naskah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Dalam percaturan politik internasional sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945, terjadi perebutan pengaruh secara ideologis antara negara-negara besar yang memenangkan Perang Dunia II. Dinamika perebutan pengaruh itu dapat dilihat dari tindakan nyata Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet (US) yang berupaya memperbesar pengaruh mereka ke berbagai belahan dunia<sup>2</sup>. Untuk tujuan tersebut, AS menerapkan *containment policy* (politik pembendungan) dalam rangka menjaga pengaruh politiknya di dunia internasional. Demikian juga dengan US, yang berupaya memperbesar pengaruhnya dengan berbagai cara, yang juga merupakan kontra politik terhadap kebijakan AS. Sebagai sebuah negara yang baru merdeka, Indonesia telah menjadi bagian sasaran dari perebutan pengaruh dua negara adidaya tersebut. Atmosfera perang dingin, mau tidak mau telah mendorong Indonesia untuk mengambil peranan penting dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 1955 di Bandung merupakan salah satu wujud dari peran politik internasional Indonesia. Aktivitas Indonesia dalam Gerakan Non Blok (GNB) menunjukkan bahwa Indonesia berupaya untuk berperan dalam dunia internasional.

Pada era Perang Dingin, kawasan Asia Tenggara tidak terlepas dari upaya perebutan pengaruh Blok Barat dan Timur. Vietnam dan Kamboja telah menjadi ladang subur pengaruh US. Malaysia, Singapura, Thailand dan Philipina dikenal dekat dengan blok Barat pimpinan AS. Sedangkan Indonesia cenderung berkiblat ke Timur, meskipun Indonesia berusaha untuk menampilkan jati dirinya sendiri. Dalam situasi yang dilematis itulah, polugri Bebas Aktif dicanangkan, yang didengungkan oleh Bung Hatta dalam bukunya yang berjudul *Mendayung Antara Dua Karang*. Perang dingin telah membawa pengaruh dalam dinamika politik dalam negeri Indonesia. Di dalam negeri, terjadi pertentangan politik yang pada akhirnya mengakibatkan kejatuhan Sukarno dari kursi presiden.

---

<sup>2</sup>Dalam politik internasional dikenal dengan sistem internasional sejak tahun 1945 dikenal dengan sistem dua kutub (*bipolarity*). Lihat KJ. Holsti, *International Politics : A Framework For Analysis*, Prentice Hall of India, 1978, hlm. 65-99. Perubahan dari *bipolarity* ke *multipolarity* dapat dilihat dalam Hans J. Morgenthau, *Politik Antar Bangsa* (Penerjemah: S. Maimoen dkk.), Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010, hlm. 389-424.

Tampilnya Suharto sebagai pemimpin baru telah mengubah orientasi politik luar negeri Indonesia. Meskipun tetap menganut azas bebas aktif, namun politik luar negeri Indonesia di bawah Suharto lebih cenderung berorientasi ke Barat. Pembentukan ASEAN (*Association of South East Asia Nations*) sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara, memperlihatkan kecenderungan orientasi polugri Indonesia. Negara-negara yang menandatangani Deklarasi Bangkok pada Agustus 1967 sebagai awal dibentuknya ASEAN adalah negara-negara yang cenderung berkiblat ke Barat. Indonesia merupakan salah satu aktor utama pendirian ASEAN. Sejak saat itu, Indonesia berupaya menjadi yang terdepan dalam kerjasama negara-negara ASEAN.

Berakhirnya perang dingin yang ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin dan bubarnya negara US, isu hubungan internasional juga bergeser, dari isu politik dan keamanan (*high politic*) ke isu lingkungan hidup, HAM dan demokratisasi (*low politic*). ASEAN juga melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam kerjasamanya, termasuk membuka peluang anggota baru. Negara-negara yang berhaluan ke Timur pada saat perang dingin juga dapat bergabung dengan ASEAN. Bidang kerjasama ASEAN yang semula hanya difokuskan pada kerjasama ekonomi, pendidikan dan sosial budaya juga bergeser ke bidang-bidang lain, seperti kerjasama militer, baik bilateral maupun multilateral sesama negara anggota ASEAN<sup>3</sup>. Meskipun antara negara-negara ASEAN melakukan kerjasama militer, namun kerjasama tersebut tidak dimaksudkan untuk membuat Pakta Pertahanan, seperti yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan Atlantik Utara dengan pembentukan NATO (*North Atlantic Treaty Organizations*). Kerjasama militer antara sesama negara ASEAN lebih ditekankan untuk menjaga saling pengertian dan menjaga keamanan di perbatasan wilayah masing-masing. Bahkan, jika kita mengamati lebih detail, kerjasama militer sesama negara-negara ASEAN lebih banyak karena faktor hubungan bilateral. Kalaupun ada

---

<sup>3</sup>Lebih lanjut dapat dibaca dalam Bambang Cipto, *Hubungan Internasional Di Asia Tenggara: Teropong Terhadap Dinamika, Realitas dan Masa Depan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

kerjasama militer yang berskala multilateral, hal itu disebabkan adanya wilayah perbatasan melibatkan lebih dari dua negara, misalnya patroli terkordinasi di kawasan Selat Malaka, yang melibatkan Indonesia, Singapura dan Malaysia. Thailand juga telah menyatakan untuk bergabung dalam kerjasama patroli terkordinasi ini.

Dalam perkembangannya, kerjasama militer negara-negara ASEAN juga difokuskan untuk aktivitas-aktivitas non militer, misalnya untuk kemanusiaan, seperti penanggulangan bencana alam yang sering menimpa negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, juga dilakukan untuk kepentingan intelijen yang terkait dengan keamanan domestik masing-masing negara. Apalagi beberapa tahun terakhir ini, terorisme telah menjadi isu dan ancaman bersama bagi negara-negara di dunia, termasuk negara-negara ASEAN. Bagi Indonesia, hal ini sangat penting dilakukan mengingat luasnya wilayah negara yang harus dijaga, baik wilayah darat, laut maupun udara. Sehingga, kerjasama militer untuk kepentingan apa pun, sangat membantu Indonesia dalam menjaga keutuhan teritorial dan ketangguhan ketahanan nasional. Secara ideologis, ancaman yang datangnya dari luar juga dapat dicegah melalui kerjasama militer.

Meskipun berbagai kerjasama militer telah dilakukan, ternyata masih tetap menimbulkan persoalan-persoalan bagi Indonesia, terutama dalam bidang politik dan keamanan. Dalam bidang politik, pengaruh ideologi kapitalis dan liberal yang dianut oleh beberapa negara ASEAN sedikit banyak telah mempengaruhi kondisi politik dalam negeri Indonesia. Nilai-nilai luhur bangsa yang terkandung dalam Pancasila, perlahan-lahan mulai pudar. Gerakan-gerakan politik liberal yang mengatasnamakan demokrasi telah merasuk alam pikiran masyarakat, yang dalam beberapa hal sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Demikian juga halnya dengan pilihan kebijakan ekonomi dalam negeri, yang menjurus kepada liberalisme ekonomi dengan munculnya kaum kelas menengah baru (konglomerat). Dalam bidang keamanan, ideologi liberal telah menjadikan rakyat lebih pragmatis, sehingga terkadang mengabaikan masalah keamanan dalam negeri. Selain itu, persoalan perbatasan dengan negara tetangga sering memicu konflik laten, padahal ada

beberapa kesepakatan kerjasama, termasuk kerjasama militer sesama anggota ASEAN. Selain itu, gerakan-gerakan terorisme yang relatif bebas di Asia Tenggara, telah mempengaruhi kondisi politik dan keamanan dalam negeri.

Dari fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dilihat adanya kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan dari kerjasama militer yang telah dilakukan dan realitas yang ada, yakni instabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara masih belum mantap, padahal kerjasama militer sesama ASEAN telah banyak dilakukan. Oleh karenanya dapat ditarik pokok permasalahan dalam tulisan TASKAP ini, yakni **“bagaimana optimalisasi peranan Indonesia dalam kerjasama militer negara-negara ASEAN Guna memantapkan stabilitas politik dan keamanan regional dalam rangka ketahanan nasional?”**

## **2. Maksud dan Tujuan**

### **a. Maksud**

Tulisan ini bermaksud untuk mengkaji dan memberikan gambaran tentang optimalisasi peranan Indonesia dalam kerjasama militer negara-negara ASEAN, yang selanjutnya dapat dirumuskan kebijakan dan menentukan strategi serta upaya-upaya yang harus dilakukan untuk memantapkan stabilitas politik dan keamanan kawasan dalam rangka ketahanan nasional RI.

### **b. Tujuan**

Tujuan penulisan Kertas Karya Perorangan (TASKAP) ini adalah untuk memahami secara lebih mendalam tentang optimalisasi peranan Indonesia dalam kerjasama militer negara-negara ASEAN yang selanjutnya diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam menentukan kebijakan dan strategi, khususnya untuk mengoptimalkan peranan Indonesia dalam kerjasama militer negara-negara ASEAN guna memantapkan stabilitas politik dan keamanan regional dalam rangka ketahanan nasional.

### 3. Ruang Lingkup dan Sistematika Tata Urut

Ruang lingkup pembahasan tulisan ini dibatasi pada masalah yang terkait dengan kerjasama militer negara-negara ASEAN, yang diharapkan dapat memantapkan stabilitas politik dan keamanan regional dalam rangka ketahanan nasional, dengan susunan sistematika/tata urut sebagai berikut :

- a. **Bab I**, yakni Pendahuluan, berisi uraian singkat tentang latar belakang permasalahan terkait dengan optimalisasi peranan Indonesia dalam kerjasama militer negara-negara ASEAN, menentukan pokok permasalahannya, kemudian membahas maksud dan tujuan penulisan, ruang lingkup dan tata urutnya, metode dan pendekatan, serta beberapa pengertian untuk menyamakan persepsi agar memudahkan membahas persoalan yang ada.
- b. **Bab II**, yakni Landasan Pemikiran, berisi uraian tentang paradigma nasional, aturan perundang-undangan sebagai landasan operasional (khususnya UU tentang RPJMN 2010-2014 dan beberapa aturan perundang-undangan yang relevan), landasan teori dan tinjauan pustaka yang digunakan, terkait dengan persoalan optimalisasi peranan Indonesia dalam kerjasama militer negara-negara ASEAN guna memantapkan stabilitas politik dan keamanan regional dalam rangka ketahanan nasional.
- c. **Bab III**, yakni Peranan Indonesia Dalam Kerjasama Militer Negara-Negara ASEAN Pada Saat Ini dan Implikasinya Terhadap Memantapkan Stabilitas Politik dan Keamanan Regional dan Ketahanan Nasional, termasuk Permasalahan Yang Dihadapi. Bab ini berisi tentang peranan Indonesia yang telah dan sedang dilakukan dalam kerjasama militer negara-negara ASEAN. Selanjutnya juga akan melihat implikasi peranan Indonesia tersebut terhadap upaya memantapkan stabilitas politik dan keamanan regional dan ketahanan nasional serta permasalahan yang dihadapi.
- d. **Bab IV**, yakni Pengaruh Perkembangan Lingkungan Strategis (banglingstra), berupa lingkungan global, regional dan nasional yang mempengaruhi optimalisasi peranan Indonesia dalam kerjasama militer

negara-negara ASEAN guna memantapkan stabilitas politik dan keamanan regional dalam rangka ketahanan nasional serta beberapa peluang dan kendala yang dihadapi.

- e. **Bab V**, setelah memperhatikan kondisi saat ini dan pengaruh banglistra yang ada, pada bab ini akan dibahas tentang kondisi optimalisasi peranan Indonesia dalam kerjasama militer negara-negara ASEAN guna memantapkan stabilitas politik dan keamanan regional dalam rangka ketahanan nasional. Bab ini juga membahas tentang pentingnya optimalisasi peranan Indonesia, kontribusi yang diharapkan guna memantapkan stabilitas politik dan keamanan regional dan indikator keberhasilannya.
- f. **Bab VI**, yakni konsepsi optimalisasi peranan Indonesia dalam kerjasama militer negara-negara ASEAN guna memantapkan stabilitas politik dan keamanan regional dalam rangka ketahanan nasional. Bab ini akan mengupas bagaimana rumusan kebijakan, strategi dan upaya agar dapat mencapai optimalisasi peranan Indonesia dalam kerjasama militer negara-negara ASEAN guna memantapkan stabilitas politik dan keamanan regional dalam rangka ketahanan nasional.
- g. **Bab VII**, yakni Penutup, memuat kesimpulan dan saran yang perlu dilakukan dalam optimalisasi peranan Indonesia dalam kerjasama militer negara-negara ASEAN guna memantapkan stabilitas politik dan keamanan regional dalam rangka ketahanan nasional.

#### **4. Metode dan Pendekatan**

Pembahasan TASKAP ini menggunakan metoda deskriptif analitis, yaitu menggambarkan data/fakta/fenomena yang ada, kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Sedangkan pendekatan yang digunakan untuk pemecahan masalah adalah pendekatan komprehensif integral melalui studi kepustakaan yang didasarkan pada landasan historis bangsa Indonesia, menggunakan landasan idiil, yakni Pancasila, landasan visional, yakni Wawasan Nusantara, landasan konseptual berupa

Ketahanan Nasional dan landasan operasional berupa aturan perundang-undangan yang terkait.

## 5. Pengertian-Pengertian

Pengertian-pengertian yang penting untuk menyamakan persepsi adalah :

- a. **Optimalisasi**, (mengoptimalkan), yaitu menjadikan sesuatu yang dilakukan menjadi paling baik<sup>4</sup>. Dalam hal ini, harus ada upaya untuk meningkatkan sesuatu yang telah dilakukan.
- b. **Peranan**, didefinisikan sebagai tindakan yg dilakukan oleh seseorang atau aktor tertentu di suatu peristiwa.<sup>5</sup> Peranan yang dimainkan oleh aktor dapat bersumber dari pemikiran aktor tersebut atau harapan-harapan yang datangnya dari luar aktor.
- c. **Kerjasama Militer**, yakni tindakan yang dilakukan secara bersama-sama dalam bidang yang terkait dengan masalah ketentaraan<sup>6</sup>. Kerjasama bisa menyangkut modernisasi persenjataan, pendidikan dan latihan personel dan juga pemanfaatan kekuatan militer untuk bidang lain selain kemiliteran, misalnya untuk penanggulangan bencana alam atau bidang kemanusiaan lainnya.
- d. **Negara-Negara ASEAN**, yaitu negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara, beranggotakan Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Philipina, Brunnei Darussalam, Myanmar, Vietnam, Laos dan Kamboja<sup>7</sup>. Pada saat berdirinya ASEAN, hanya ada lima negara yang menandatangani Deklarasi, yakni Indonesia, Thailand, Singapura, Malaysia dan Philipina. Beberapa tahun kemudian ikut bergabung juga negara Brunnai Darussalam, Myanmar, Vietnam, Laos dan Kamboja. Sementara ini, Timor Leste yang juga berada di kawasan Asia tenggara, belum resmi menjadi anggota ASEAN.

---

<sup>4</sup> Diambil dari <http://kamusbahasaindonesia.org>

<sup>5</sup>*Ibid.* Sebenarnya bisa juga dilihat dalam teori peranan yang dikemukakan oleh Alan C. Isaak dalam "The Method of Political Sciences", New Jersey: Prentice Hall, Englewoods Cliffs, 1987.

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>Diambil dari Dirjen Kerjasama ASEAN Deplu RI, *ASEAN Selayang Pandang*, Jakarta: Dirjen Kerjasama ASEAN Deplu RI, 2005, hlm. 4



- e. **Memantapkan Stabilitas Politik dan Keamanan Regional** adalah menjadikan stabil kondisi pemerintahan dan keadaan yang aman bagi kawasan tertentu<sup>8</sup>.
- f. **Ketahanan Nasional** adalah kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan secara nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dalam negeri yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional<sup>9</sup>.

=====

---

<sup>8</sup>Pengertian ini diambil dari gabungan pengertian kata *politik*, *keamanan* dan *regional*, lihat <http://kamusbahasaindonesia.org>.

<sup>9</sup>Diambil dari Pokja Ketahanan Nasional Lemhannas RI. *Materi Pokok Bidang Studi Ketahanan Nasional*, Modul 1 s.d. 3, h 4. Jakarta: Lemhannas RI, 2011, hlm. 15. Lihat juga Ermaya Suradinata. *Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategi Dalam Rangka Keutuhan NKRI*, Jakarta: Suara Bebas, 2005, hlm. 11.

## BAB II

### LANDASAN PEMIKIRAN

#### 6. Umum

Perjalanan polugri tetap konsisten dengan berpedoman pada orientasi bebas aktif. Peran polugri bebas aktif ini membawa Indonesia tampil di forum-forum internasional, misalnya dengan menyelenggarakan Konferensi Asia-Afirka (KAA) I di Bandung pada tanggal 18 April 1955 di bawah pimpinan Sukarno<sup>10</sup>. KAA telah membawa predikat bagi Indonesia sebagai pelopor kebangkitan negara-negara berkembang yang menginginkan kemandirian dari pengaruh negara besar.

Selain itu, Indonesia menjadi ujung tombak bagi negara-negara berkembang dalam organisasi Gerakan Non Blok (GNB)<sup>11</sup>. Peran penting Indonesia di GNB yang diprakarsai oleh Sukarno dan dilanjutkan oleh Suharto melalui langkah-langkah strategisnya. Pada awal kelahirannya, agenda politik menjadi fokus utama GNB. Sejak pertengahan 1970-an, seiring dengan mulai merosotnya pengaruh negara adi daya terhadap kutub-kutubnya, yang diikuti oleh pergeseran isu keamanan militer ke isu ekonomi, GNB juga menyesuaikan diri dengan mengedepnakan isu non politik-militer. Meskipun keputusan-keputusan yang disepakati dalam GNB bersifat *morally binding*, yang tidak memiliki kekuatan mengikat (*obligatory*), namun sebagai sebuah gerakan (*movement*), GNB telah

---

<sup>10</sup>Konferensi Asia Afrika I (KAA) dihadiri oleh 29 negara peserta, yang menghasilkan *Bandung Declaration*, dikenal dengan Dasa Sila Bandung, yakni :1. Menghormati hak-hak dasar manusia seperti yang tercantum pada Piagam PBB, 2. Menghormati kedaulatan dan integritas semua bangsa, 3. Menghormati dan menghargai perbedaan ras serta mengakui persamaan semua ras dan bangsa di dunia, 4. Tidak ikut campur dan intervensi persoalan negara lain, 5. Menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri baik sendiri maupun kolektif sesuai dengan piagam PBB, 6. Tidak menggunakan peraturan dari pertahanan kolektif dalam bertindak untuk kepentingan suatu negara besar, 7. Tidak mengancam dan melakukan tindak kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu Negara, 8. Mengatasi dan menyelesaikan segala bentuk perselisihan internasional secara damai dengan persetujuan PBB, 9. Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama, 10. Menghormati hukum dan kewajiban internasional. Diunduh dari *Komunitas dan Perpustakaan Online Indonesia*.

<sup>11</sup>Gerakan Non Blok (GNB) atau *Non-Aligned Movement* (NAM) didirikan pada tahun 1961 dengan diselenggarakannya KTT Pertama GNB di Beograd, Yugoslavia. GNB saat ini beranggotakan 114 negara. Diunduh dari *yahoo answer*.

menjadi kelompok penekan (*interest group*) tingkat dunia, terutama dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pada level regional, Indonesia juga menjadi pionir berdirinya organisasi negara-negara kawasan Asia Tenggara, yang dikenal dengan *Association of South East Asian Nations* (ASEAN). Sebelumnya, telah ada organisasi serupa di kawasan Asia Tenggara yang juga melibatkan Indonesia, diantaranya MAPHILINDO (Malaya, Philipina, Indonesia)<sup>12</sup>. Perubahan situasi politik dalam negeri mempengaruhi Suharto sebagai pemimpin baru Indonesia untuk menciptakan kawasan regional yang damai. Oleh karenanya, Indonesia berupaya mendorong lahirnya ASEAN sebagai organisasi regional yang kuat. Kebijakan tersebut diimplementasikan dengan keterlibatan Indonesia saat penandatanganan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967, yang ditetapkan sebagai hari jadi ASEAN. Deklarasi Bangkok secara eksplisit memiliki latar belakang aspirasi dan komitmen politik para pemimpin negara-negara pendiri ASEAN untuk bersatu dalam wadah kerjasama. Alasan pembentukan ASEAN didasarkan atas kehendak politik, yakni keinginan bersama untuk menciptakan stabilitas regional yang sangat diperlukan bagi pembangunan ekonomi nasional negara-negara kawasan<sup>13</sup>.

Dengan mempertimbangkan maksud dan tujuan dibentuknya ASEAN, Indonesia merasa perlu melakukan langkah-langkah nyata agar cita-cita ASEAN dapat tercapai, namun tidak merugikan kepentingan nasional Indonesia. Sebagai salah satu bentuk jawaban dari upaya mewujudkan alasan pembentukan ASEAN, kerjasama militer sesama negara-negara ASEAN sangat diperlukan dalam rangka meminimalisir sikap saling curiga dan potensial mengancam hubungan baik yang telah dibangun sebelumnya. Untuk melaksanakan berbagai macam kerjasama regional, termasuk kerjasama militer, Indonesia telah memiliki pijakan yang kokoh. Oleh karenanya, berbagai pilihan kebijakan tersebut tetap sejalan dengan paradigma nasional yang menjadi patokan Indonesia dalam melangkah.

---

<sup>12</sup>Lihat Dirjen Kerjasama ASEAN Deplu RI, *op-cit*, hlm.1.

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 2.

Paradigma nasional dijadikan pedoman penting guna meningkatkan kewaspadaan nasional terhadap kemungkinan potensi munculnya ancaman ipoleksosbud dan hankam yang bisa saja datang dari berbagai penjuru. Adapun paradigma nasional yang sudah baku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah ditetapkan oleh bangsa Indonesia meliputi Pancasila, UUD NRI 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional. Selain itu, aturan perundang-undangan yang berlaku juga harus menjadi patokan dalam setiap langkah yang ditempuh. Paradigma nasional dan aturan perundang-undangan inilah yang kemudian dikenal dengan **instrumental input** dalam proses penentuan pilihan kebijakan.

## 7. Paradigma Nasional

### a. Pancasila sebagai landasan idiil<sup>14</sup>

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan cermin nilai-nilai dasar kehidupan nasional berdasarkan semangat persatuan dan kesatuan. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki kekuatan mengikat secara hukum pada seluruh tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai ideologi, Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenaran, ketetapan, dan kemanfaatannya bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi dijadikan sebagai landasan yang menjiwai semangat melaksanakan upaya untuk memantapkan kewaspadaan nasional terhadap munculnya Tantangan, Ancaman, Hambatan dan Gangguan (TAHG) yang berpotensi datang dari dalam maupun dari luar negara Indonesia.

Sebagai landasan Idiil, Pancasila merupakan landasan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap warga negara Indonesia sebagai ideologi dan dasar negara untuk diamalkan dan dihayati secara utuh dalam setiap kehidupan berbangsa, bernegara dan

---

<sup>14</sup>Penjelasan tentang Pancasila sebagai Landasan Idiil ini sebagian besar diambil dari Pokja Ideologi Lemhannas RI, *Bidang Studi/Materi Pokok Pancasila dan Perkembangannya*, Jakarta: Lemhannas RI, 2011. Tentang Pancasila ini juga dapat dibaca dalam Yudi Latif. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011, hlm. 1-56. Baca juga AM Fatwa. *Pancasila Karya Bersama Milik Bangsa: Bukan Hak Paten Suatu Golongan*. Jakarta: The Fatwa Center, 2010.

bermasyarakat yang mengandung keseimbangan dan keselarasan, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, hubungan dengan lingkungannya, masyarakat dan bangsa-bangsa lain di dunia, serta selalu tetap menjaga hubungan dengan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Sebagai falsafah pandangan hidup bangsa, Pancasila pada hakikatnya merupakan cerminan nilai-nilai dasar secara harmonis, serasi, selaras dan seimbang dengan semangat kesatuan dan persatuan, kebersamaan dan kearifan dalam membina aspek kehidupan nasional. Pancasila memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum pada seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila berasal dari nilai-nilai kehidupan sosial budaya luhur yang mengakar dalam kehidupan warga negara Indonesia dan menjadi suatu pegangan untuk mencapai suatu tujuan kehidupannya.

Mengingat Pancasila sebagai landasan idiil, kerjasama militer yang dilakukan oleh Indonesia harus mencerminkan semangat nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Dengan dasar itulah, kerjasama militer sesama negara ASEAN dan upaya mengoptimalkan peranan Indonesia di dalamnya, tetap selalu berpegang pada nilai-nilai Pancasila. Militer Indonesia harus menunjukkan sikap nilai-nilai luhur yang telah berkembang dalam diri bangsa Indonesia. Tentunya, nilai luhur tersebut bukanlah nilai-nilai yang bersifat ekspansionistis seperti yang dapat dilihat dari nilai-nilai militer negara adi daya, seperti AS. Sebaliknya, Indonesia selalu mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dalam kerjasama militer, tanpa mengurangi kewaspadaan terhadap kepentingan nasional dan ketahanan nasional bangsa Indonesia.

#### **b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 Sebagai Landasan Konstitusional<sup>15</sup>**

Sebagai landasan konstitusional, UUD NRI 1945 merupakan keputusan politik bangsa, memuat norma-norma konstitusional untuk

---

<sup>15</sup>Penjelasan tentang UUD NRI 1945 sebagai sebagai Landasan Konstitusional sebagian besar diambil dari Pokja Ideologi Lemhannas RI. *Bidang Studi/Materi Pokok Ideologi Modul 2 : UUD 1945 Hasil Amandemen dan Sosialisasinya*, Jakarta: Lemhannas RI, 2011.

menentukan sistem dan bentuk negara serta pemerintahan yang bersifat demokratis. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 memuat maksud didirikannya NKRI, cita-cita nasional, tujuan nasional dan dasar negara. Cita-cita tersebut dapat dicapai jika terwujud stabilitas politik dan keamanan nasional yang mantap, sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. UUD NRI Tahun 1945 juga merupakan hukum dasar tertulis, yang memuat norma-norma atau aturan-aturan dalam penyelenggaraan negara guna mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Selain itu, UUD NRI Tahun 1945 juga meletakkan dasar sistem kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai bagian dari upaya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berbagai upaya untuk mengoptimalkan peranan Indonesia dalam kerjasama militer negara-negara ASEAN harus diperuntukkan dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional RI yang tangguh. Oleh karenanya, segala bentuk pola sikap dan pola tindak komponen bangsa, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus mengacu kepada UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional<sup>16</sup>. Dengan demikian, segala tindakan yang diambil akan dapat menjaga keutuhan wilayah NKRI.

### **c. Wawasan Nusantara (Wasantara) Sebagai Landasan Visional<sup>17</sup>**

Konsepsi Wasantara mencakup 4 hal, yaitu : (1) kesatuan politik (dalam arti kesatuan wilayah berikut isi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya), menjadi modal kesatuan bangsa yang terdiri dari berbagai etnis, agama dan budaya, wasantara merupakan satu kesatuan sebangsa dan setanah air dalam bingkai kesatuan ideologi

---

<sup>16</sup>Lebih lanjut tentang pedoman TNI ini dapat dilihat juga dalam A.H. Nasution. *Ideologi TNI: Menuju UUD Proklamasi*, Yogyakarta: Jurnal Media Inovasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (terbatas untuk kalangan sendiri), 1995.

<sup>17</sup>Penjelasan tentang Konsepsi Wasantara ini diambil dari Pokja Wawasan Nusantara. *Materi Pokok BS Wawasan Nusantara*, Jakarta: Lemhanas RI, 2011.

Pancasila dan kesatuan hukum nasional; (2) kesatuan sosial budaya (kesatuan masyarakat yang perikehidupannya terjaga dalam keserasian, keseimbangan, dan keselarasan) dalam kesatuan budaya nasional; (3) kesatuan ekonomi (kekayaan wilayah, baik potensial maupun efektif, merupakan modal dan milik bersama serta kebutuhan hidup sehari-hari, pemanfaatannya harus tersedia merata di seluruh tanah air, perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh tanah air tanpa meninggalkan karakteristik perekonomian daerah); (4) kesatuan pertahanan dan keamanan (setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam bela negara, ancaman keamanan di wilayah/daerah manapun merupakan ancaman nasional yang harus dihadapi secara bersama).

Dengan berpedoman kepada wasantara sebagai landasan visional, maka upaya mengoptimalkan peranan Indonesia dalam kerjasama militer negara-negara ASEAN guna memantapkan stabilitas politik dan keamanan regional dalam rangka ketahanan nasional harus selalu mengacu pada konsep Wawasan Nusantara. Berbagai macam pertimbangan langkah strategis yang akan ditempuh, hendaknya tetap berpedoman pada geopolitik dan geostrategi bangsa Indonesia<sup>18</sup>. Dengan cara itulah, bangsa Indonesia dapat mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.

#### **d. Ketahanan Nasional Sebagai Landasan Konsepsional<sup>19</sup>**

Ketahanan Nasional (*National Resilience*) adalah kondisi dinamis bangsa yang memiliki tingkat ketangguhan dan keuletan dalam mengembangkan dan memobilisasi kekuatan nasional untuk menghadapi dan mengatasi TAHG yang datang dari dalam maupun dari negeri dan dapat membahayakan integritas dan kelangsungan

---

<sup>18</sup>Tentang Geopolitik ini dapat dilihat dalam Pokja Wawasan Nusantara, *Bidang Studi/Materi Pokok Geopolitik dan Wawasan Nusantara: Modul 1 dan 3 Sub BS Wawasan Nusantara*, Jakarta: Lemhannas RI, 2011. Penerapan geopolitik dan geostrategi dapat dilihat dalam Ermaya Suradinata, *op-cit*.

<sup>19</sup>Penjelasan tentang Ketahanan Nasional ini sebagian besar diambil dari Pokja Ketahanan Nasional. *Materi Pokok Bidang Studi Ketahanan Nasional*, Modul 1 s.d. 3, Jakarta: Lemhannas RI, 2011, hlm. 15.

hidup berbangsa dan bernegara. Ketahanan nasional juga merupakan konsepsi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka mencapai cita-cita nasional. Ketahanan nasional yang merupakan kondisi dinamis bangsa dapat ditelaah dari beberapa aspek, yaitu aspek geografi, demografi dan sumber kekayaan alam (aspek alamiah/gatra alamiah/trigatra) serta aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan (aspek sosial/gatra dinamis/pancagatra).

Sebagai upaya optimalisasi peranan Indonesia dalam kerjasama militer negara-negara ASEAN guna memantapkan stabilitas politik dan keamanan regional dalam rangka ketahanan nasional, para pengambil keputusan Indonesia harus berpedoman pada ketahanan nasional sebagai landasan konseptualnya. Semua tindakan yang diambil, harus memperhatikan gatra-gatra ketahanan nasional. Oleh karenanya, ketahanan nasional yang tangguh harus dijaga sebagai bagian dari upaya untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional serta mempertahankan NKRI.

## **8. Aturan Perundang-Undangan sebagai Landasan Operasional**

Aturan perundang-undangan yang terkait adalah sebagai berikut :

### **a. UU RI Nomor : 5 Tahun 1983 tentang ZEE.**

Dalam Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1983 menyatakan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia, meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.

### **b. UU RI Nomor : 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS.**

Penekanan isi dari UU ini menyangkut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang mengatur pula rejim-rejim hukum sebagai berikut: 1). Laut Teritorial dan Zona Tambahan, 2). Selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, 3). Zona Ekonomi



Eksklusif 4). Landas Kontinen, 5). Laut Lepas, 6). Rejim Pulau, 7). Rejim Laut tertutup/setengah tertutup, 8). Rejim akses negara tidak berpantai ke dan dari laut serta kebebasan transit, 9). Kawasan Dasar laut Internasional, 10). Perlindungan dan pemeliharaan lingkungan Laut, 11). Penelitian ilmiah kelautan, 12). Pengembangan dan Alih Teknologi, 13). Penyelesaian Sengketa.

**c. UU RI Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional**

Penegasan dalam UU No 24 Tahun 2000 yang terkait dengan tulisan ini diantaranya pada pasal 4 yang menyebutkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan; dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan iktikad baik. Kemudian, ditegaskan pada ayat (2), bahwa dalam pembuatan perjanjian internasional, pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada **kepentingan nasional** dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, memperhatikan hukum nasional maupun hukum internasional.

**d. UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara**

Beberapa hal penting yang terkait dengan pertahanan negara ini diantaranya terdapat pada pasal 2 yang menyatakan bahwa hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai. Pasal 3 ayat (2) menyebutkan pertahanan negara disusun dengan memperhatikan **kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.**

Dalam Pasal 4 ditegaskan bahwa pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Terkait dengan penyelenggaraan pertahanan negara, disebutkan dalam pasal 6, bahwa pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman. Pasal 7 ayat (2) mengamanahkan bahwa sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.

**e. UU RI Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional**

UU RI Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional yang terkait dengan tema penulisan TASKAP ini diantaranya terdapat pada pasal 7 ayat (1), yang menegaskan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta **melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.**

Selain itu, pasal 7 ayat (2) menegaskan cara melakukan tugas pokok seperti yang tercantum pada ayat (1), yakni dilakukan dengan:

- a. operasi militer untuk perang;
- b. operasi militer selain perang, yaitu untuk
  1. mengatasi gerakan separatis bersenjata;
  2. mengatasi pemberontakan bersenjata;
  3. mengatasi aksi terorisme;
  4. mengamankan wilayah perbatasan;
  5. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
  6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
  7. mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
  8. memberdayakan wilayah pertahanan dan

kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta; 9. membantu tugas pemerintahan di daerah; 10. membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang; 11. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia; 12. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan; 13. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta 14. membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

**f. UU RI Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025**

Dalam RPJPN Tahun 2005-2025 ditegaskan bahwa **Visi Pembangunan Nasional tahun 2005-2025** adalah **INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR.**

Sedangkan misi pembangunan nasional ditetapkan ada 8 (delapan) poin. Khusus yang terkait dengan tulisan ini terdapat pada **poin 4**, yakni **mewujudkan Indonesia yang aman, damai, dan bersatu** adalah membangun kekuatan TNI hingga melampaui kekuatan esensial minimum serta disegani di kawasan regional dan internasional, **poin 7**, yaitu **mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional** adalah menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan dan **poin 8**, yakni **mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional** adalah memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerja

sama internasional, regional dan bilateral antar masyarakat, antar kelompok, serta antar lembaga di berbagai bidang.

RPJPN Tahun 2005-2025 ini kemudian dijabarkan dalam RPJMN 2009-2014. Dalam alinea kedua RPJMN 2009-2014 disebutkan bahwa kondisi aman dan damai di berbagai daerah di Indonesia terus membaik dengan meningkatnya kemampuan dasar pertahanan dan keamanan negara yang ditandai dengan peningkatan postur dan struktur pertahanan negara serta peningkatan kemampuan lembaga keamanan negara.

## 9. Landasan Teori.

Landasan teori yang digunakan adalah :

### a. Geopolitik dan Geostrategi

Menurut Sir Balford Mackinder, geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijakan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografis (kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah atau teritorial dalam arti luas) suatu negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung atau tidak langsung kepada sistem politik negara yang bersangkutan. Geostrategi diartikan sebagai metoda dan aturan-aturan mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan nasional yang memberikan arah tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman dan bermartabat.<sup>20</sup>

### b. Konsep Kepentingan Nasional

Hubungan bilateral sebagai salah satu produk kebijakan luar negeri suatu negara merupakan implementasi dari kepentingan nasional negara-negara yang bersangkutan. Pokok permasalahan dalam hal penentuan kebijakan luar negeri umumnya lebih ditekankan pada usaha-usaha untuk memecahkan berbagai persoalan yang

---

<sup>20</sup>Ermaya Suradinata, *op-cit*, hlm. 10.

berhubungan dengan luar negeri atau dalam negeri. Hubungan atau politik internasional terjadi karena setiap negara memiliki kepentingan nasional yang ingin dicapai.

Jack C. Plano dan Roy Olton dalam *Kamus Hubungan Internasional* menjelaskan bahwa kepentingan nasional merupakan elemen-elemen mendasar yang menjadi pedoman para pengambil keputusan suatu negara yang ditujukan kepada negara lain. Adapun elemen-elemen tersebut meliputi kedaulatan (*souvereignty*), kemerdekaan (*independence*), keutuhan wilayah (*territorial integrity*), keamanan militer (*military security*) dan kesejahteraan ekonomi (*economic well-being*)<sup>21</sup>.

Menurut Hans J. Morgenthau tentang kepentingan nasional adalah<sup>22</sup> :

*“Kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Hubungan kekuasaan dan pengendalian itu bisa diciptakan melalui teknik-teknik paksaan maupun kerja sama”*

Dari definisi konsep kepentingan nasional, dapat ditegaskan bahwa upaya optimalisasi peranan Indonesia dalam kerjasama militer sesama negara-negara ASEAN harus memperhatikan elemen-elemen mendasar. Lebih dari itu, tujuan optimalisasi peranan pun hendaknya didasarkan pada upaya mencapai kepentingan nasional Indonesia.

## 10. Tinjauan Kepustakaan.

Sebenarnya, banyak karya tulis yang membahas tentang kerjasama militer. Namun demikian, tulisan yang membahas kerjasama militer tersebut lebih banyak menyangkut kerjasama militer dalam skala global. Bambang Cipto dalam bukunya *Hubungan Internasional Di Asia Tenggara: Terpong Terhadap Dinamika, Realitas dan Masa Depan*, lebih banyak

---

<sup>21</sup>Diambil dari Jack C. Plano & Roy Olton, (terjemahan oleh Wawan Juanda), *The International Relations Dictionary*, Bandung:1990.

<sup>22</sup>Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional; Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES, 1990, hlm. 139

menyoroti persoalan ekonomi dalam kerjasama ASEAN<sup>23</sup>. Meskipun ada pembahasan tentang militer, namun tulisan Bambang Cipto tidak membahas tentang pentingnya optimalisasi peranan Indonesia dalam kerjasama militer negara-negara ASEAN guna memantapkan stabilitas politik dan keamanan dalam rangka ketahanan nasional. Bambang Cipto lebih banyak membahas tentang perilaku politik luar negeri masing-masing negara-negara ASEAN. Selain itu, Bambang Cipto membahas bagaimana pergumulan pengaruh eksternal ASEAN, khususnya untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi. Sedangkan kerjasama militer tidak dibahas dalam buku tersebut. Bambang Cipto membahas adanya konflik internal negara-negara ASEAN yang terkait masalah perbatasan.

Tulisan lain tentang keamanan di Asia Tenggara dapat dilihat pada tulisan Derek Johnson dan Mark Valencia (editor) dalam bukunya *Piracy In Southeast Asia: Status, Issues and Responses*, yang membahas tentang tindakan kriminal di kawasan Asia Tenggara<sup>24</sup>. Namun, buku ini tidak membahas tentang kerjasama militer. Sebagai bunga rampai, buku ini tidak banyak memberikan solusi, namun hanya menggambarkan fakta. Selanjutnya, H.S. Kirbiantoro dan Dody Rudianto menulis lebih spesifik tentang pertahanan Indonesia, namun tidak membahas tentang kemungkinan optimalisasi peranan Indonesia dalam kerjasama militer sesama negara ASEAN<sup>25</sup>. Buku yang berjudul *Rekonstruksi Pertahanan Indonesia: Potensi, Tantangan dan Prospek* ini lebih banyak membahas masalah kondisi pertahanan internal Indonesia. Hal penting yang dibahas dalam buku tersebut dan dapat membantu penulis dalam menyusun TASKAP ini adalah adanya gambaran tentang potensi kekuatan militer Indonesia, yang dapat diimplementasikan secara strategis di lingkup ASEAN.

TASKAP ini membahas tentang optimalisasi peranan Indonesia dalam kerjasama militer negara-negara ASEAN, yang diperlukan untuk

---

<sup>23</sup>Lihat kembali Bambang Cipto, *op-cit*.

<sup>24</sup>Baca Derek Johnson dan Mark Valencia, *Piracy In Southeast Asia: Status, Issues and Responses*. Singapura: Institute of South East Asian Studies (ISEAS), 2005.

<sup>25</sup>Baca H.S. Kirbiantoro dan Dody Rudianto *Pertahanan Indonesia: Potensi, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Golden Terayon Press, 2010.

memantapkan stabilitas politik dan keamanan regional dalam rangka ketahanan nasional. Inilah yang membedakan tulisan terdahulu dengan tulisan yang akan dibahas dalam TASKAP ini. Namun demikian, berbagai tulisan yang telah ada sebelumnya akan sangat membantu penulis untuk melengkapi dan menyempurnakan penyusunan TASKAP ini.

=====

**BAB III**  
**PERANAN INDONESIA DALAM KERJASAMA MILITER**  
**NEGARA-NEGARA ASEAN PADA SAAT INI DAN IMPLIKASINYA**  
**TERHADAP MEMANTAPKAN STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN**  
**REGIONAL DAN KETAHANAN NASIONAL SERTA**  
**PERMASALAHAN YANG DIHADAPI**

**11. Umum**

Sebagai bagian dari dunia internasional, atmosfera perang dingin juga melanda kawasan Asia Tenggara. Politik pembendungan (*containment policy*) AS juga telah melibatkan kawasan Asia Tenggara. Bahkan, di Asia Tenggara pernah dibentuk pakta militer, yakni SEATO (*Southeast Asia Treaty Organisations*), yang disponsori AS<sup>26</sup>. Indonesia tidak terlibat dalam SEATO karena Sukarno memiliki kebijakan yang tidak berorientasi ke Barat. Selain itu, Sukarno memiliki pandangan menentang kekuatan yang dianggap sebagai kepanjangan tangan kolonialisme dan dapat mengganggu jalannya revolusi Indonesia. Sikap penolakan Indonesia untuk bergabung dengan SEATO dianggap sebagai sikap Sukarno yang kekiri-kirian. Padahal, Indonesia memiliki kebijakan luar negeri bebas aktif. Dalam perspektif bebas aktif, sudah sewajarnya Indonesia tidak bersedia bergabung dalam SEATO.

Pergantian rezim yang terjadi di Indonesia pada tahun 1965 telah mengubah kiblat pandangan luar negeri Indonesia. Suharto cenderung berkiblat ke Barat dengan mengusung ideologi yang lebih terbuka bagi kepentingan ekonomi kapitalis dan orientasi politik yang condong ke Barat. Hal ini ditandai dengan munculnya ide pembentukan organisasi regional kawasan Asia Tenggara tahun 1967, yakni ASEAN. Organisasi baru ini condong berkiblat ke Barat mengingat anggotanya yang berkiblat ke ideologi non komunis. Beberapa negara komunis yang ada di Asia Tenggara tidak

---

<sup>26</sup>SEATO adalah organisasi internasional pertahanan kolektif yang ditandatangani pada tanggal 8 September 1954 di Manila, Filipina. Lembaga formal SEATO dibentuk pada pertemuan mitra perjanjian di Bangkok pada bulan Februari 1955. Organisasi ini didirikan untuk memblokir berkembangnya komunisme lebih lanjut di Asia Tenggara. Markas besar organisasi ini berlokasi di Bangkok, Kerajaan Thailand. SEATO dibubarkan pada tanggal 30 Juni 1977. Diambil dari *wikipedia.org*.



terlibat dalam organisasi ini. Alasan dibentuknya ASEAN didasarkan atas kehendak politik, yaitu keinginan bersama untuk menciptakan stabilitas regional yang sangat diperlukan bagi pembangunan ekonomi negara-negara kawasan<sup>27</sup>. Salah satu maksud dan tujuan dibentuknya ASEAN adalah untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas keamanan dengan menghormati keadilan dan tertib hukum dalam hubungan antar negara-negara kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip dalam Piagam PBB<sup>28</sup>.

Kerjasama ASEAN juga berkembang sejalan dengan perkembangan isu-isu global. Berakhirnya perang dingin membawa konsekuensi adanya pergeseran kerjasama ASEAN, baik intra ASEAN maupun antara ASEAN dengan mitra dialognya. Selain kerjasama yang bersifat multilateral, di dalam anggota ASEAN juga dijalin kerjasama bilateral dalam berbagai bidang. Kerjasama politik dan keamanan ASEAN meliputi :

- a. Kawasan Damai, Bebas dan Netral (*Zone of Peace, Freedom and Neutrality* --ZOPFAN), sebagai implementasi Deklarasi KL tahun 1971.
- b. Traktat Persahabatan dan Kerjasama (*Treaty Of Aminty And Cooperations* --TAC), yang dianggap sebagai elemen penting bagi efektivitas implementasi ZOPFAN dan menciptakan stabilitas politik dan kermanan kawasan Asia Tenggara, ditandatangani tahun 1976.
- c. Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara (*South East Asia Nuclear Weapon Free Zone* – ASEANWFZ), bentuk komitmen yang juga penting bagi negara-negara kawasan Asia Tenggara untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan kawasan, termasuk adanya untuk mengeliminir penggunaan senjata nuklir di kawasan.
- d. Forum Regional ASEAN (ASEAN Regional FORUM – ARF), yaitu forum untuk saling bertukar informasi dan pandangan tentang masalah politik dan keamanan regional dan internasional yang melibatkan negara-negara di kawasan Asia Pasifik.

Sebagai salah satu bentuk kerjasama negara-negara ASEAN, Indonesia menjalin kerjasama bilateral. Tulisan ini dibatasi pada peranan

---

<sup>27</sup>Dirjen Kerjasama ASEAN Deplu RI dalam *op-cit*, hlm. 2. Selanjutnya dalam tulisan tersebut juga ditulis tentang maksud dan tujuan dibentuknya ASEAN.

<sup>28</sup>Lihat poin 2 dari maksud dan tujuan dibentuknya ASEAN, dalam *ibid*.

Indonesia dalam kerjasama militer negara-negara ASEAN guna memantapkan stabilitas politik dan keamanan regional dalam rangka ketahanan nasional.

## **12. Peranan Indonesia Dalam Kerjasama Militer Negara-Negara ASEAN Pada Saat Ini**

Indonesia perlu menjalin hubungan baik di bidang militer agar dapat menciptakan suasana kondusif bagi kawasan Asia Tenggara. Kerjasama militer diharapkan dapat menciptakan saling pengertian dan dapat menimbulkan efek *spillover* (peluberan) ke bidang-bidang lainnya, yakni politik, keamanan, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain.

Beberapa kerjasama militer yang telah dilakukan negara-negara ASEAN dan peranan Indonesia adalah sebagai berikut :

### **a. MALSINDO (*Malacca Straits Coordinated Patrol*)**

Selat Malaka terletak di perairan Sumatera dan Semenanjung Malaka, merupakan urat nadi perdagangan dunia yang menghubungkan Samudera Hindia dan Pasifik, atau dari Asia Barat hingga Asia Timur. Panjang Selat Malaka diperkirakan 800 Km, dan telah menjadi pusat perdagangan dunia sejak zaman kerajaan-kerajaan Nusantara. Sebanyak 72 persen perdagangan dunia melalui Selat Malaka. Dari sisi ekonomi, Selat Malaka sangat strategis. Selat Malaka telah menjadi jalur pelayaran terpenting dan paling sibuk di dunia saat ini. Seperti halnya Terusan Suez dan Terusan Panama, terdapat lebih dari 50.000 kapal melintasi Selat Malaka setiap tahunnya.

Untuk memberikan rasa aman kepada para pengguna alur Selat Malaka, maka Indonesia merasa perlu melakukan kerjasama dengan negara-negara yang bersinggungan langsung dengan Selat Malaka. Maka, disepakatilah kerjasama patroli terkordinasi, yakni MALSINDO (Malaysia, Indonesia dan Singapura). Yang dipilih bukan “patroli bersama (*joint patrol*)”, namun “patroli terkordinasi (*coordinated patrol*)”. Malsindo telah menyepakati adanya operasi gabungan yang terdiri atas tiga negara, yakni Indonesia, Singapura dan Malaysia dalam upaya

mengontrol, mengawasi, dan mengamankan perairan Selat Malaka. Operasi ini diresmikan pada tanggal 20 Juli 2004 di atas KRI Tanjung Dapele<sup>29</sup>. Operasi terkordinasi ini penting dilakukan mengingat selat Malaka merupakan alur yang sangat strategis bagi perdagangan dunia. Keamanan Selat Malaka merupakan cermin keamanan laut Indonesia.

Berdasarkan data Organisasi Maritim Internasional (IMB, *International Maritime Bureau*), menyebutkan bahwa selat Malaka semakin aman. Perompakan periode Januari-Maret 2007 di seluruh dunia turun secara drastis jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2006. Insiden perompakan bersenjata atas kapal-kapal untuk tiga bulan pertama tahun 2007 mencapai 41 kasus, atau 20 persen lebih rendah dibandingkan tahun 2006 yang mencapai 61 kasus, terbanyak di Somalia dan Nigeria<sup>30</sup>.

b. Kerjasama Militer Indonesia - Singapura

Kerjasama militer antara Indonesia dan Singapura ini telah terjalin cukup lama melalui *Defense Cooperation Agreement*. Perjanjian ini ditandatangani dan disahkan pada 21 September 1995. Penandatanganan perjanjian tersebut diwakili oleh Menteri Pertahanan RI Jenderal (Purn.) Edi Sudrajat dan Menteri Pertahanan Singapura Dr. Tony Tan<sup>31</sup>. Beberapa aktivitas telah dilakukan sebagai langkah kongkret untuk mengimplementasikan perjanjian yang telah disepakati tersebut.

Selain patroli bersama di Selat Malaka, antara TNI dan *Singapore Army Forces (SAF)*, kerjasama militer juga dilakukan dalam bidang pendidikan. Kerjasama militer antara kedua negara juga dilakukan antara angkatan dan angkatan negara masing-masing. Beberapa kerjasama yang telah dilakukan diantaranya ISJTC (*Indonesia-Singapura Joint Training Committee*), yakni latihan bersama "Safkar Indopura" dan *Joint Army Training Working Group (JATWG)* untuk Angkatan Darat. Latihan bersama tahunan "Sea Eagle Indopura"

---

<sup>29</sup><http://yaleglobal.yale.edu>

<sup>30</sup>[www.kemhan.go.id](http://www.kemhan.go.id), "Selat Malaka Kini Lebih Aman".

<sup>31</sup><http://wastumconda.wordpress.com>

dan *Joint Navy Training Working Group* (JNTWG) antara Angkatan Laut kedua negara dan latihan bersama tahunan "Elang Indopura" kemudian diganti dengan "Camar Indopura" dan *Joint Air Force Training Working Group* (JAFTWG) antara Angkatan Udara kedua negara.

c. Latgabma Malindo Darsasa (Latihan Gabungan Bersama Malaysia-Indonesia Samudera dan Angkasa)

Dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang dewasa ini, militer Indonesia dan Malaysia sepakat untuk meningkatkan kerjasama. Kerjasama militer yang dimaksud terutama terkait dengan pengamanan wilayah perbatasan, baik laut maupun darat yang sering diributkan dalam waktu beberapa tahun terakhir. Bahkan kesepakatan tersebut sudah ditegaskan oleh panglima AB masing-masing negara. Hubungan erat militer antara kedua negara yang telah terjalin sudah cukup lama akan menjadi landasan kokoh bagi perluasan kerjasama yang lebih nyata dan bermanfaat. Tidak hanya bagi kedua angkatan bersenjata, namun juga bagi perluasan dan peningkatan interaksi serta kerjasama antara angkatan darat, angkatan laut serta angkatan udara kedua belah pihak. Pelaksanaan kerjasama militer dapat menimbulkan suasana yang kondusif bagi kawasan Asia Tenggara.

Angkatan Bersenjata kedua negara sebenarnya telah melakukan pertemuan secara rutin dan efektif, yakni melalui forum *General Border Committee* (GBC) Malindo sejak tahun 1972. Bahkan, kedua angkatan bersenjata secara khusus juga melaksanakan forum *High Level Committee* (HLC) Malindo sejak 2006. Dengan semakin eratnya hubungan antara angkatan bersenjata antara Indonesia dan Malaysia, diharapkan dapat menimbulkan efek *spillover* (peluberan) ke berbagai aspek kehidupan lainnya yang dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan masyarakat di sepanjang perbatasan Indonesia dan Malaysia<sup>32</sup>.

Kerjasama militer bidang pertahanan antara Malaysia dan Indonesia yang terus dipererat oleh kedua negara mencangkup bidang

---

<sup>32</sup>Lihat lebih lanjut lihat *suarakarya-online.com*, 06 Juli 2011.

operasi, latihan, pendidikan dan sosial. Dalam bidang operasi dilakukan melalui latihan keamanan di laut, dengan patroli bersama untuk mengamankan wilayah, termasuk latihan menanggulangi terorisme. Kedua negara juga sering memberikan pernyataan bersama bahwa masing-masing tidak pernah saling mengancam, tetapi saling mendukung satu sama lain guna menjaga teritorial masing-masing negara. Hal ini merupakan penegasan bahwa kerjasama militer antara kedua negara merupakan sesuatu yang sangat strategis dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan regional.

d. Joint Bilateral Commission Indonesia-Philippines

Hubungan militer Indonesia dan Philipina telah berlangsung lama dan terjalin cukup baik. Hubungan militer antara Indonesia dan Filipina semakin erat dengan keterlibatan Indonesia dalam pengiriman personel militer yang bertugas sebagai pengawas internasional masalah Moro. Selain itu, beberapa kerjasama militer yang dilakukan, diantaranya patroli perbatasan dan upaya menanggulangi terorisme. Militer Indonesia dan Philipina sepakat meningkatkan pengamanan wilayah perbatasan, terutama perbatasan laut melalui patroli terkoordinasi. Patroli terkoordinasi yang dilakukan angkatan laut kedua negara merupakan bagian dari kerja sama militer kedua pihak yang telah berjalan baik selama ini. Kerjasama juga dilakukan dalam bidang pendidikan dan latihan. Bahkan, kerjasama ini akan dikembangkan untuk menangani korban bencana alam yang sering terjadi di negara masing-masing.

Sampai saat ini, belum ada kesepakatan tentang batas maritim kedua negara. Kerjasama antara Indonesia dan Filipina dalam masalah perbatasan dilakukan melalui forum JCBC (*Joint Commission for Bilateral Cooperation*), membicarakan masalah yang terkait dengan isu keamanan bersama, antara lain tentang pelintas batas tradisional, penyelundupan, perompakan, pembajakan di perbatasan maritim dan kejahatan lintas batas negara lainnya. Dengan kerjasama tersebut,

diharapkan akan menghasilkan situasi yang kondusif bagi stabilitas politik dan keamanan regional.

e. Kerjasama Militer Indonesia dan Thailand

Dalam menjalin kerjasama militer, Indonesia dan Thailand sering mengadakan pertemuan yang dikenal dengan pertemuan *High Level Committee* (HLC) Hasil pertemuan tersebut dilaporkan kepada Menteri Pertahanan (Menhan) masing-masing. HLC merupakan forum komunikasi, koordinasi, dan pertimbangan untuk seluruh kegiatan "military to military" dan segala permasalahan terkait TNI dan Angkatan Bersenjata Kerajaan Thailand atau *The Royal Thai Armed Forces* (RTARF). Kegiatan "military to military" meliputi bidang operasi, intelijen, latihan bersama, menjaga perdamaian, pendidikan, dan pelatihan. Forum HLC juga dikenal dengan *Thailand Indonesia High Level Military Committee* (TIHLMC) yang memiliki kewenangan menentukan ruang lingkup, metode, dan penerapan kegiatan *military to military* antara RTARF dan TNI dalam garis besar panduan kebijakan dan kerangka kerjasama. TIHLMC juga menjadi forum untuk mendiskusikan permasalahan keamanan regional dan mengusulkan inisiatif-inisiatif yang diperlukan serta sasaran kerja sama keamanan.

Untuk memaksimalkan kerjasama militer, TIHLMC dibentuk atas sembilan pilar yakni *Ketua Bersama yang dijabat oleh Panglima TNI dan Panglima Angkatan Bersenjata Thailand, Sekretariat Bersama, Sub Komite Operasi Terkoordinasi Bersama, Sub Komite Latihan dan Pendidikan Bersama, Sub Komite Intelijen Bersama, Sub Komite Non Keamanan Militer, Army Joint Working Group, Navy Joint Working Group, dan Air Force Joint Working Group. Sub Komite TIHLMC bertanggung jawab untuk koordinasi, termasuk memberikan arahan dan perintah kepada JWG Angkatan Darat, Laut dan Udara. TIHLMC mengadakan pertemuan rutin sekali dalam setahun secara bergantian di Indonesia dan Thailand, dengan agenda satu kali formal dan sekali informal.*

Militer kedua negara juga sepakat mewaspadaikan perkembangan politik di Laut China Selatan. Menghangatkan suasana keamanan di Laut China Selatan dengan tampilnya kekuatan China, secara tidak langsung akan berdampak pada situasi keamanan di kawasan ASEAN. Sebagai anggota ASEAN yang memiliki perbatasan maritim, Indonesia perlu mewaspadaikan kemungkinan terkena imbas dari bergejolaknya situasi keamanan di beberapa wilayah tersebut.

f. Kerjasama militer Indonesia dan Vietnam

Pada tanggal 22 Februari 2005, di Istana Kepresidenan Vietnam, Hanoi, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk menandatangani nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) terkait dengan pencegahan dan pemberantasan kejahatan, meningkatkan kerjasama memerangi kejahatan, terorisme, *transnational crime* dan pembajakan laut. MoU tersebut ditandatangani oleh kedua Menteri Luar negeri, yaitu Nur Hassan Wirajuda sebagai Menlu RI dan Li Hong Ant sebagai Menlu Vietnam, yang disaksikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Trim Due Luong. Dalam nota kesepahaman tersebut, juga disinggung tentang keinginan meningkatkan kerjasama, yakni bidang industri pertahanan, pendidikan dan latihan, pengawasan perbatasan, serta saling mengunjungi para pejabat militer kedua Negara.

### **13. Implikasi Peranan Indonesia Dalam Kerjasama Militer Negara-Negara ASEAN Pada Saat Ini Guna Memantapkan Stabilitas Politik Dan Keamanan Regional dan Ketahanan Nasional**

Setiap tindakan yang dilakukan oleh suatu negara, akan memiliki implikasi terhadap lingkungan internal dan eksternal. Peranan Indonesia dalam kerjasama militer dengan negara-negara ASEAN memiliki implikasi yang juga tidak kalah pentingnya bagi lingkungan Indonesia sendiri.

#### **a. Implikasi Peranan Indonesia Dalam Kerjasama Militer Negara ASEAN Pada Saat Ini Terhadap Memantapkan Stabilitas Politik Dan Keamanan Regional**

Dalam setiap kerjasama internasional, terdapat azas kesetaraan dengan prinsip *sovereign of equity*. Sebenarnya tidak mudah untuk

mengatakan bahwa satu pihak lebih berperan dari pada pihak lain. Mengingat kerjasama militer Indonesia dengan negara-negara ASEAN juga menganut prinsip tersebut, maka sebenarnya sulit untuk mengatakan adanya peran penting Indonesia dalam kerjasama yang dilakukan. Namun demikian, peranan Indonesia yang aktif dalam menjalin kerjasama militer dengan negara-negara ASEAN juga memiliki implikasi terhadap upaya memantapkan politik dan keamanan regional. Beberapa implikasi yang dapat dilihat adalah sebagai berikut :

1). Potensi Konflik Masalah Perbatasan Menjadi Ancaman Laten

Saling pengertian sebagai konsekuensi dari kerjasama akan bermanfaat bagi keberlangsungan stabilitas politik dan keamanan regional di kawasan ASEAN. Mengingat Indonesia merupakan negara terbesar di ASEAN, maka peranan Indonesia memiliki arti penting dalam kerjasama militer yang dilakukannya. Keterlibatan Indonesia dalam menjalin kerjasama militer dengan negara-negara ASEAN dapat mengurangi eskalasi konflik terbuka, terutama konflik perbatasan, mengingat Indonesia memiliki perbatasan yang sangat panjang dengan negara-negara ASEAN lainnya. Jika muncul konflik perbatasan, maka cara-cara damai akan lebih mudah ditempuh karena militer negara-negara ASEAN telah menjalin kerjasama.

Pilihan untuk menyelesaikan masalah Sipadan dan Ligitan ke Mahkamah Internasional dan menghindari penggunaan kekuatan militer merupakan salah satu contoh bahwa saling pengertian antara militer Indonesia dan Malaysia telah menghindari instabilitas keamanan regional. Demikian juga untuk kasus Ambalat, adanya pengertian antara militer kedua negara, dapat terhindar dari bentrokan senjata antara TNI AL dan Angkatan Laut Tentara Diraja Malaysia. Namun, potensi konflik masih tetap ada, terutama terkait dengan masalah perbatasan.

2). Terjadi Kohesifitas Semu Di Kalangan Negara ASEAN

Dalam pergaulan internasional, setiap negara selalu berupaya mempertahankan kepentingan nasionalnya, seperti halnya dengan



kerjasama yang dilakukan negara-negara ASEAN, semua berlandaskan kepentingan nasional. Oleh karena itu, peranan Indonesia yang sekarang dalam kerjasama militer dengan negara-negara ASEAN memang sedikit banyak dapat menjaga stabilitas politik dan keamanan regional. Namun demikian, jika ada hal-hal yang dapat mengganggu kepentingan nasional salah satu negara, maka negara tersebut lebih mementingkan kepentingan nasionalnya dari pada kepentingan regional.

Sebenarnya Indonesia dapat memainkan peranan yang lebih dari apa yang ada sekarang, mengingat stabilitas politik dan keamanan regional sangat berpotensi memunculkan konflik, terutama konflik perbatasan dan persaingan perdagangan. Dalam internal ASEAN, konflik bukannya tidak ada, namun selalu diredam melalui kerangka kerjasama ASEAN secara luas. Hal ini tidak menyelesaikan masalah, justru menjadi api dalam sekam, yang sewaktu-waktu dapat meledak. Dengan optimalisasi peranan Indonesia, diharapkan Indonesia memiliki *influence* (pengaruh) yang kuat di ASEAN. Indonesia harus dapat menjadi negara yang disegani karena kemampuan yang dimilikinya dalam segala bidang.

### 3). Belum Semua Negara ASEAN Menjalin Kerjasama Militer

Kerjasama militer Indonesia dengan negara-negara ASEAN secara intensif baru dilakukan dengan negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, terutama perbatasan laut. Sementara ada juga negara ASEAN yang digandeng dalam kerjasama militer, namun aktivitasnya belum intensif, misalnya dengan Kamboja, Brunnai Darussalam, Laos dan Myanmar. Kurangnya keterlibatan menyeluruh negara-negara ASEAN dalam kerjasama militer dengan Indonesia dapat mengurangi upaya untuk memantapkan stabilitas politik dan keamanan regional. Misalnya, Indonesia akan mengalami kesulitan untuk memberikan masukan kepada pemerintahan Junta Militer Myanmar dalam hal demokratisasi di negara tersebut. Oleh karenanya, penting juga bagi Indonesia

untuk menjalin kerjasama militer yang lebih intensif lagi dengan seluruh negara ASEAN secara bilateral.

4). **Belum Semua Negara Tetangga ASEAN Menjalinkan Kerjasama Militer**

Indonesia menyambut baik adanya niat beberapa negara di luar ASEAN dalam pengamanan Selat Malaka dengan syarat-syarat tertentu, Namun Indonesia masih belum berupaya menjajaki kerjasama dengan negara tetangga ASEAN, seperti Papua New Guenie (PNG) dalam kerjasama militer. Bagi Indonesia, sebenarnya PNG sangat penting terkait dengan perbatasan darat yang cukup panjang di Irian Jaya atau Papua. Jika Indonesia dapat menggandeng PNG dalam kerjasama militer seperti halnya dengan negara-negara ASEAN, maka masalah-masalah perbatasan dan pelintas batas serta OPM, kemungkinan akan lebih mudah diselesaikan. Hal yang sama juga berlaku bagi Timor Leste, meskipun dengan potensi masalah yang relatif lebih ringan. Jika tetangga ASEAN telah menjalin kerjasama militer dengan Indonesia secara efektif dan intens, maka diharapkan stabilitas politik dan keamanan domestik dan regional akan dapat lebih dimantapkan lagi.

**b. Implikasi Memantapkan Stabilitas Politik Dan Keamanan Regional Terhadap Ketahanan Nasional**

Kondisi regional, akan dapat mempengaruhi kondisi dalam negeri Indonesia. Kondisi politik dan keamanan yang mantap di regional ASEAN akan dapat mempengaruhi ketahanan nasional Indonesia dalam aspek gatra yang ada.

Secara **geografis**, posisi Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudera merupakan posisi yang sangat strategis. Akan tetapi, hal itu berpotensi juga menjadi ancaman jika tidak dikelola secara baik. Ancaman yang dapat timbul dapat berupa tindakan kriminal lintas batas, gangguan terhadap teritorial dan ancaman lain yang dapat mengganggu mantapnya stabilitas politik dan keamanan regional dalam rangka ketahanan nasional. Secara **demografis**, Jumlah penduduk yang

mencapai 237,6 juta jiwa<sup>33</sup>, dengan 656 suku bangsa dan berbagai macam adat istiadat serta kepercayaan, merupakan ancaman potensial bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Kondisi politik dan keamanan regional yang tidak stabil akan mempengaruhi kondisi domestik. Dari aspek **Sumber Kekayaan Alam (SKA)**, Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Mantapnya stabilitas politik dan keamanan regional akan mempengaruhi upaya memaksimalkan pengelolaan SKA demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Kemampuan untuk mengelola penduduk yang sangat besar dan juga SKA yang cukup berlimpah secara baik akan dapat mempertanggung ketahanan nasional Indonesia.

Dari aspek **Ideologi**, Pancasila telah ditetapkan sebagai ideologi, falsafah hidup, dan pedoman hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun demikian, globalisasi telah membawa efek samping dengan terdegradasinya nilai-nilai dasar Pancasila. Dengan mantapnya stabilitas politik dan keamanan regional, berarti politik dan keamanan lingkungan internal Indonesia juga menjadi stabil. Stabilitas politik dan keamanan regional yang mantap, sedikit banyak dapat membantu membendung masuknya ideologi lain ke Indonesia. Dari aspek **gatra politik**, situasi dan kondisi politik di Indonesia belakangan ini disibukkan oleh pertarungan/konflik elit politik, dikarenakan adanya kepentingan individu atau kelompok dengan mengatasnamakan kepentingan masyarakat. Kondisi ini semakin memburuk jika stabilitas politik dan keamanan regional terganggu. Pada gilirannya juga dapat mengganggu ketahanan nasional Indonesia. Dari aspek **gatra ekonomi**, kebijakan ekonomi liberal sesungguhnya kontraproduktif dengan ide dasar Pancasila. Ekonomi liberal memiliki potensi menghambat pemberdayaan ekonomi kerakyatan sebagai wujud pengamalan nilai Pancasila. Indonesia dapat menentukan pilihan kebijakannya yang sesuai dengan Pancasila, jika stabilitas politik dan keamanan regional dapat terjaga dengan baik. Dari **gatra sosial budaya**, bangsa Indonesia memiliki tingkat pluralitas yang tinggi. Oleh karenanya, stabilitas politik dan keamanan regional yang

---

<sup>33</sup>Menurut data BPS Tahun 2010.

mantap memang diperlukan untuk menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa. Rakyat Indonesia sangat heterogen dan sangat mudah terprovokasi, termasuk provokasi dari pihak asing. Kasus Jamaah Islamiyah (JI) adalah contoh bagaimana pengaruh asing dapat menciptakan instabilitas politik dan keamanan domestik di Indonesia. Dari faktor gatra **pertahanan dan keamanan**, yang terkait langsung dengan masalah ketahanan nasional. Masalah pertahanan dan keamanan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam rangka menjaga stabilitas nasional. Terganggunya kondisi pertahanan keamanan nasional akan menghambat upaya mencapai tujuan dan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Gangguan keamanan di beberapa tempat merupakan gambaran stabilitas nasional belum kondusif dan dapat mengancam keutuhan NKRI.

#### **14. Permasalahan Yang Dihadapi**

Dalam setiap kerjasama, terdapat beberapa hal yang kadangkala tidak sesuai dengan keinginan masing-masing pihak. Demikian juga halnya dengan peranan Indonesia dalam kerjasama militer negara-negara ASEAN, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, yakni :

##### **a. Belum Tuntasnya Batas-batas Negara Indonesia dengan Negara-Negara Tetangga**

Dalam membicarakan masalah batas negara, Indonesia memiliki masalah perbatasan wilayah dengan negara-negara ASEAN, diantaranya dengan Malaysia yang sampai saat ini masih kontroversial. Terkait dengan perbatasan-pebatasan tersebut, baik darat maupun laut, masih banyak yang belum diselesaikan dengan tuntas, terutama menyangkut kepastian letak patok-patoknya dan dapat menimbulkan gesekan-gesekan. Kondisi itu berakibat pada lemahnya posisi Indonesia mengoptimalkan peranannya dalam kerjasama militer. Apalagi Indonesia pernah mengalami kekalahan dari Malaysia dalam sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan di Mahkamah Internasional. Secara psikologis, kekalahan tersebut dapat mengecilkan posisi Indonesia dalam kancah Internasional.

Salah satu contoh dari dampak belum tuntasnya masalah perbatasan ini adalah masih adanya ketidakcocokan *standard operation procedure* (SOP) yang diterapkan oleh Malaysia, baik dari wilayah operasi pengamanan hingga perbatasan yang masih rancu di daerah Selat Malaka. Sedangkan dengan Singapura, tidak terjadi hal yang demikian.

Masalah batas-batas negara ini memang bukan tugas TNI untuk menyelesaikannya, namun **UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, pasal 7 ayat (2). b. poin 4**, menugaskan TNI agar **mengamankan wilayah perbatasan**. Terkait dengan hal itu, TNI akan mengalami kesulitan dalam menjaga perbatasan jika batas-batas negara Indonesia dengan negara tetangga belum diselesaikan dengan tuntas. Bagaimanapun, akan muncul dampak psikologis dari kondisi yang belum jelas ini. Untuk melakukan tindakan, tentu akan muncul dilema, mengingat tindakan yang tidak tepat dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak menguntungkan, baik bagi institusi TNI sendiri, maupun bagi negara Indonesia.

#### **b. Rendahnya Alokasi Anggaran Pertahanan Negara**

Anggaran pertahanan Indonesia saat ini relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan anggaran pertahanan negara-negara ASEAN lainnya. Memang, secara nominal, bisa saja terlihat jumlahnya lebih besar, namun jika nominal tersebut ditinjau dari GDP, jumlah penduduk dan luas wilayah sesama negara ASEAN, maka jumlah alokasi anggaran pertahanan Indonesia sangat rendah (lihat lampiran). Rendahnya anggaran pertahanan membawa konsekuensi pada minimnya peralatan dan perlengkapan militer yang dimiliki oleh Indonesia, baik secara kuantitas maupun kualitas. Pada saat melakukan kerjasama, terlihat bahwa peralatan dan perlengkapan militer Indonesia sangat minim dari pada negara-negara ASEAN lainnya. Minimnya peralatan dan perlengkapan militer berdampak secara psikologis bagi Indonesia untuk memainkan peranannya secara optimal dalam kerjasama militer dengan negara-negara ASEAN.

### **c. Belum Stabilitasnya Kondisi Politik Dalam Negeri**

Reformasi tahun 1998 telah melahirkan kebijakan-kebijakan yang paradoksial. UU tentang pemilihan umum, pemilukada dan otonomi daerah telah membawa kondisi carut marut politik dan pemerintahan di Indonesia. Berbagai konflik horizontal sering terjadi akibat reformasi yang kehilangan arah. Bahkan, jati diri bangsa Indonesia, yakni Pancasila telah ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Korupsi telah terjadi di hampir semua level pemerintahan dengan berbagai macam modus operandinya. Hal ini dapat menimbulkan berkurangnya rasa hormat bangsa lain terhadap bangsa Indonesia. Dampaknya, Indonesia tidak dapat menjalankan peranannya dengan optimal dalam kerjasama militer karena secara psikologis, *prejudice* sebagai bangsa yang korup selalu melekat pada setiap elemen bangsa.

Kondisi politik domestik yang tidak stabil, akan menyulitkan Indonesia dalam memainkan peranannya di forum internasional. Meskipun tidak berdampak langsung bagi peranan militer dalam kerjasama, namun kondisi yang tidak stabil di dalam negeri seringkali menyulitkan TNI untuk menentukan langkah-langkah strategisnya. Rendahnya akseptabilitas TNI di mata masyarakat karena reformasi yang tidak terarah, dapat menahan laju gerak TNI untuk melakukan kerjasama militer yang lebih optimal. Oleh karenanya, kondisi politik yang tidak stabil, juga menjadi persoalan dalam optimalisasi peranan Indonesia dalam kerjasama militer di ASEAN.

### **d. Kurangnya Pemahaman Manajemen Bencana Alam di Kalangan Militer ASEAN**

Wilayah Asia Tenggara memiliki struktur alam yang rawan bencana alam. Berbagai bentuk bencana alam selalu mengancam sebagian besar wilayah negara-negara ASEAN. Banjir di Thailand merupakan contoh adanya bencana alam di negara-negara ASEAN. Selain banjir, bencana gempa bumi selalu mengintai beberapa wilayah negara ASEAN mengingat letaknya pada pertemuan *lempeng eurasia*

*dan lempeng pasifik* yang rawan mengalami keretakan. Hal ini dapat menimbulkan gempa bumi hebat yang dapat berakibat pada tsunami.

Pada masa mendatang, kerjasama militer negara ASEAN dapat dikembangkan ke bidang penanggulangan bencana alam. Aksi tanggap darurat yang paling efektif dapat dilakukan oleh militer, mengingat kemampuan teknis yang dimilikinya. Hanya saja, pihak militer masih kurang memiliki kemampuan manajerial menangani bencana alam, terutama dalam menangani dampak sosial yang timbul pasca terjadinya bencana. Pemahaman manajemen bencana secara konferehensif bagi kalangan militer Indonesia dapat memberikan nilai tambah bagi peranan Indonesia dalam kerjasama militer negara-negara ASEAN.

Bagi militer Indonesia sendiri, ikut serta dalam menanggulangi bencana alam telah diamanatkan dalam **UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pasal 7 ayat (2).b, poin 12** menyebutkan bahwa **tugas pokok TNI dilakukan dengan cara membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan**. Peningkatan kemampuan manajerial tentang penanggulangan bencana alam juga perlu menjadi konsern TNI pada masa yang akan datang. Hal itu semakin terasa diperlukan dengan adanya pergeseran definisi keamanan dari yang konvensional tradisional ke non konvensional non tradisional. Selain itu, kerjasama militer dalam menanggulangi bencana alam ini telah dilakukan saat terjadi bencana Tsunami di Aceh.

=====

## **BAB IV**

### **PENGARUH PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS**

#### **15. Umum.**

Dalam sebuah sistem politik, lingkungan merupakan faktor yang ikut mempengaruhi pengambilan keputusan. Lingkungan dapat merespons keputusan sistem politik. David A. Easton seperti yang dikutip oleh Haryanto dalam bukunya *Sistem Politik: Suatu Pengantar*, menyatakan bahwa lingkungan dalam sistem politik terbagi atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal<sup>34</sup>. Lingkungan internal adalah lingkungan yang berasal dari dalam sistem politik. Sedangkan lingkungan eksternal adalah situasi yang berkembang di luar sistem politik, baik regional maupun global. Kondisi apapun yang terjadi dalam lingkungan eksternal Indonesia, dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan di Indonesia.

Mengacu pada pendapat Easton, perkembangan lingkungan strategis sangat berpengaruh terhadap kondisi politik dan keamanan suatu negara. Pembangunan nasional Indonesia sebagai ikhtiar mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional Indonesia tidak terlepas dari pengaruh lingkungan strategis, baik eksternal (*global dan regional*) maupun internal (*nasional*). Pengaruh lingkungan strategis bisa berdampak positif dan negatif. Oleh karena itu, para penyelenggara negara harus mencermati perkembangan lingkungan strategis tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang strategis pula, sehingga perkiraan kendala dapat dieliminir dan peluang dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam menjalain kerjasama dengan negara lain, termasuk kerjasama militer dengan negara-negara ASEAN.

#### **16. Pengaruh Lingkungan Global.**

Pengaruh globalisasi yang paling cepat dan langsung berdampak adalah perkembangan ekonomi, Ketika terjadi krisis keuangan akibat macetnya kredit perumahan di Amerika Serikat (AS) pada tahun 2008 -

---

<sup>34</sup>Haryanto, *Sistem Politik: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1988, hlm. 4.



2009/2010<sup>35</sup>, perekonomian Amerika Serikat mengalami guncangan yang sangat hebat. Kondisi ini kemudian menyebar ke Eropa dan masuk ke juga menjalar ke Asia. Dampaknya adalah terguncangnya perekonomian dunia serta goyahnya kepercayaan (*trust*) terhadap perekonomian barat dengan Liberalismenya. Pengaruh global juga sangat terasa ketika terjadi "krisis Timur Tengah"<sup>36</sup> pada akhir 2010 dan awal 2011 yang mempunyai dampak signifikan bagi perekonomian dunia, termasuk Indonesia.

Seiring dengan berakhirnya perang dingin, isu hubungan internasional bergeser dari politik keamanan ke *Hak-Hak Azasi Manusia (HAM)*, *Demokratisasi*, *Lingkungan Hidup*, *Terorisme Internasional* dan *Kejahatan Trans-nasional* lainnya. Kampanye tentang isu-isu tersebut dilakukan oleh pemerintah suatu negara atau melalui *Non Government Organization (NGO)/LSM* dengan dukungan berbagai media massa dan jaringan internet, telah berhasil mempengaruhi kebijakan berskala global dan kadangkala menyulitkan negara Indonesia. Namun demikian, faktor kekuatan militer masih tetap harus diperhatikan mengingat kekuatan militer masih menjadi andalan negara AS untuk "memaksakan" diplomasi mereka kepada negara-negara lain.

Pergeseran isu politik keamanan ke isu ekonomi telah membawa konsekuensi semakin terbukanya peluang ekonomi liberal dalam dunia internasional. Implementasi ekonomi liberal adalah dengan disepakatinya perdagangan bebas di tingkat dunia yang ditandai dengan pembentukan WTO (*World Trade Organizations*). Kesepakatan WTO juga diikuti dengan pembentukan berbagai kesepakatan perdagangan bebas di beberapa kawasan. Di Amerika Utara telah dibentuk NAFTA (*North American Free Trade Area*). Sebelumnya, Eropa telah menyepakati Masyarakat Ekonomi

---

<sup>35</sup>Akhir Juli 2007 terkuak krisis *subprime mortgage* di Amerika Serikat (AS.) karena *subprime mortgage loans* tergolong Kredit atau Aktiva Produktif (*earning assets*) bank-bank di USA dengan kualitas macet dan diragukan. Kondisi tersebut kemudian berampak meluas ke kredit perumahan di Amerika Serikat. Krisis kemudian berlanjut pada tahun 2009 dan 2010 dengan dampak global, lihat <http://kolumnis.com>.

<sup>36</sup>*Gejolak di Timur Tengah Guncang Ekonomi Dunia*, lihat <http://berita.liputan6.com>. Gejolak di Timur Tengah diawali dari runtuhnya Presiden Ben Ali dari Tunisia, yang kemudian merembet ke Mesir dengan jatuhnya Hosni Mubarak, yang kemudian berimbas ke negara-negara lain seperti Libya, Yordania dan beberapa negara lain.

Eropa (MEE) yang berkembang menjadi Masyarakat Eropa (ME). Di kawasan Asia Pasifik, disepakati APEC (*Asia Pacific Economic Cooperations*), yang melibatkan Indonesia. Bahkan, ASEAN telah menyepakati AFTA (*Asean Free Trade Area*), yang diperluas dengan menambah China sebagai anggota dan menjadi CAFTA (*China- Asean Free Trade Agreement*).

Pembentukan berbagai organisasi perdagangan bebas kawasan ini dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, dapat mengundang arus investasi, barang dan jasa yang lebih mudah ke Indonesia. Sedangkan dampak negatifnya, Indonesia dapat menjadi negara konsumen saja, jika produk-produk Indonesia tidak dapat bersaing dalam pasar bebas. Kondisi ini juga dapat mempengaruhi stabilitas politik dalam negeri karena adanya kesenjangan ekonomi yang sangat besar.

Dengan SKA yang dimiliki, sebenarnya Indonesia dapat berperan dalam perdagangan bebas kawasan. Indonesia dapat menjadi pemasok utama kebutuhan negara-negara ASEAN. Sehingga, kemampuan SKA dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia di mata negara-negara ASEAN. Peningkatan posisi tawar akan dapat mempengaruhi optimalisasi peranan Indonesia dalam kerjasama militer negara-negara ASEAN.

## **17. Pengaruh Lingkungan Regional**

Perkembangan lingkungan strategis di Kawasan Asia Tenggara banyak dipengaruhi oleh adanya *Asean Free Trade Area* (AFTA) yang kemudian diperluas menjadi *China-Asean Free Trade Agreement* (CAFTA)<sup>37</sup> sebagai konsekuensi berdirinya *Asia Pacific Economic Cooperations* (APEC). Dorongan untuk melakukan liberalisasi perdagangan telah menyebabkan semua kawasan di dunia mempersiapkan kawasan masing-masing untuk menghadapi persaingan bebas perdagangan dunia. Kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan dalam ACFTA harus diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Dampak

---

<sup>37</sup>AFTA sejak tahun 2010 diperluas menjadi CAFTA (*China- ASEAN Free Trade Agreement*).

ACFTA telah dirasakan dengan kedatangan Kapal dagang China yang memasuki Indonesia, terutama pelabuhan Tanjung Priok dan Makasar telah meningkat 400%.<sup>38</sup> ACFTA yang ditandatangani tahun 2002 ternyata tidak diimbangi dengan kesiapan Indonesia untuk menghadapinya secara matang.

Isu-isu pelintas batas, TKW, perdagangan narkoba lintas negara dan masalah sosial budaya lainnya masih sering muncul dan perlu terus diwaspadai agar tidak mempengaruhi hubungan baik antar sesama negara ASEAN. Stabilitas keamanan kawasan ASEAN masih diwarnai oleh masalah perbatasan, khususnya antara Indonesia dan Singapura, Indonesia dan Malaysia, yang dapat menyulut gesekan. Selain itu, isu teroris yang pernah berlatih dan bergabung dengan kelompok radikal di Malaysia perlu diwaspadai, karena pengikut jaringan kelompok ini diduga terus mendukung radikalisme di Indonesia. Mereka melakukan aktivitas lintas negara, keluar dan masuk Indonesia melalui wilayah perbatasan yang jauh dari pengawasan aparat keamanan. Untuk itulah, ASEAN memerlukan kerjasama intelijen dalam menghadapi isu terorisme ini.

Berbagai persoalan yang timbul itu harus diwaspadai oleh Indonesia. Kerjasama militer dalam berbagai bidang merupakan solusi yang tepat bagi Indonesia, karena Indonesia selama ini banyak dirugikan dengan adanya berbagai kasus yang muncul. Pada masa mendatang, masalah yang muncul akan semakin kompleks, sehingga Indonesia harus memiliki peranan yang signifikan dalam kerjasama militer yang dilakukan. Indonesia memiliki kepentingan dalam menjaga stabilitas kawasan, termasuk upaya pembentukan komunitas keamanan ASEAN, penanggulangan terorisme dan keamanan pelayaran di Selat Malaka<sup>39</sup>.

---

<sup>38</sup>"Barang China Akan Menyerbu Pasar Domestik", *Harian Seputar Indonesia*, 17 Maret 2010

<sup>39</sup>Lebih lanjut tentang ASEAN masa depan dapat dibaca lebih detail dalam C.P.F., Luhulima, (Ed.: Awani Irawati), *Dinamika Asia Tenggara Menuju 2015*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, bekerjasama dengan Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, 2011, hlm. 279-392. Selain itu, Bambang Cipto membahas masalah keamanan kawasan ini, lihat Bambang Cipto, *op-cit.* hlm. 224-243. Khusus masalah Selat Malaka, dapat dibaca dalam Graham Gerard Ong-Webb (Eds.), *Piracy, Maritime Terrorism and Securing the Malacca Straits*, Singapore: ISEAS Publishing, 2006.

Optimalisasi peranan Indonesia dalam merespons isu lingkungan strategis regional ini memang harus dirumuskan secara cepat, tepat dan realistis, khususnya dalam kerjasama militer negara-negara ASEAN.

Pentingnya Indonesia melakukan optimalisasi kerjasama militer dengan negara-negara ASEAN juga tidak terlepas dari letak geografis Indonesia yang bertetangga dengan beberapa negara-negara Persemakmuran (*Commonwealth of Nations*) bentukan Inggris. Negara-negara Persemakmuran ini merupakan negara-negara bekas jajahan Britania Raya atau Inggris yang telah membentuk jaringan dan ikatan tersendiri. Meskipun keanggotaannya sukarela, namun ikatan psikologis diantara mereka sangat kuat. Sampai sekarang, negara-negara Persemakmuran beranggotakan 54 negara, yang bertetangga dengan Indonesia ada 7 negara, yakni Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Australia, Selandia Baru, PNG dan India.

Negara-negara Persemakmuran tidak secara resmi menyatakan ada kerjasama militer dalam programnya, namun diantara negara-negara Persemakmuran tersebut adakalanya menyelenggarakan kerjasama militer, seperti latihan perang bersama. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk mengoptimalkan peranannya dalam kerjasama militer negara-negara ASEAN. Latihan militer bersama negara-negara Persemakmuran di Asia tenggara terkadang melibatkan Inggris. Bahkan adakalanya melibatkan Inggris untuk melakukan latihan bersama di Semenanjung Malaka. Untuk itulah, Indonesia harus mengambil kebijakan yang strategis dalam kerjasama militer agar dapat dioptimalkan.

## **18. Pengaruh Lingkungan Nasional.**

Lingkungan nasional juga sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang ditempuh oleh suatu pemerintahan. Perkembangan lingkungan nasional Indonesia beberapa tahun terakhir ditandai oleh terjadinya berbagai bencana alam, konflik komunal, kemiskinan, korupsi dan terorisme. Beberapa isu nasional yang menonjol saat ini antara lain perilaku anggota parlemen yang sering tidak simpatik, konflik pemilukada

dan konflik horizontal di masyarakat. Kasus lain adalah semakin maraknya ancaman bom, misalnya bom buku dan bom bunuh diri serta isu Negara Islam Indonesia (NII) semakin meluas. Belum lagi masalah-masalah yang terkait dengan kasus korupsi, tentu harus diwaspadai dan dicarikan solusi secara tepat, termasuk dengan melibatkan bantuan pihak-pihak asing di kawasan ASEAN.

Perkembangan strategis dari perspektif lingkungan nasional lebih lanjut dapat dicermati melalui tinjauan aspek asta gatra sebagai berikut :

#### **a. Aspek Geografi**

Seperti yang telah dijelaskan, salah satu inti kekuatan nasional adalah geografi<sup>40</sup>. Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari sekitar 17.508 pulau,<sup>41</sup> tersebar di seluruh nusantara berada pada posisi strategis di persilangan dua samudera dan dua benua serta di daerah khatulistiwa. Dengan posisi geografis yang sangat strategis, idealnya Indonesia memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang kuat terhadap negara-negara yang memiliki kepentingan-kepentingan politik, keamanan dan ekonomi di kawasan. Namun demikian, posisi ini potensial menimbulkan keinginan negara lain untuk menguasai, Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hamparan wilayah yang sangat luas juga dapat menimbulkan kerawanan terhadap tumbuh suburnya perdagangan gelap lintas negara, perompakan, terorisme atau kelompok radikal lainnya untuk melakukan operasi mereka tanpa dapat dikontrol oleh pihak-pihak yang berwenang. Oleh karenanya, kewaspadaan dini dan rencana strategis kerjasama militer dengan negara-negara ASEAN harus dioptimalkan. Optimalisasi kerjasama militer merupakan pilihan yang strategis untuk mencegah instabilitas keamanan di kawasan ASEAN. Mantapnya stabilitas politik dan keamanan regional dapat mendukung terciptanya ketahanan nasional Indonesia.

---

<sup>40</sup>Lihat lagi Morgenthau, Hans, J. & Kenneth W. Thompson, dalam *op.cit*, hlm. 135.

<sup>41</sup>Diambil dari <http://id.wikipedia.org>

## b. Aspek Demografi

Penduduk merupakan salah satu kekuatan nasional sebuah negara<sup>42</sup>. Sebagai kekuatan nasional, jumlah penduduk akan dapat menjadi kekuatan yang dapat dimobilisasi (*mobilized power*) atau hanya sekadar menjadi kekuatan yang potensial saja (*potential power*) jika tidak dikelola secara baik. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia saat ini adalah lebih dari 237 Juta.<sup>43</sup> Secara umum, kualitas SDM Indonesia masih rendah karena tingkat pendidikan dan kesehatan yang juga rendah. Akibatnya, terjadilah pengangguran yang cukup besar. Banyak tenaga kerja informal Indonesia yang mencari pekerjaan di luar negeri, khususnya di negara tetangga. Namun, permasalahan yang muncul juga tidak kalah peliknya, misalnya kedatangan mereka yang tidak resmi (*illegal worker*).

Selain itu, kondisi penduduk yang demikian, sangat rawan menimbulkan tindakan kriminal. Kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah akan lebih mudah dimanfaatkan oleh unsur asing untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan di dalam negeri, misalnya kurir narkoba atau pembalakan liar di hutan-hutan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Di laut, sering juga terjadi penangkapan-penangkapan para nelayan Indonesia karena memasuki perairan negara tetangga.

## c. Aspek Sumber Kekayaan Alam (SKA)

SKA Indonesia yang dulu melimpah, sedikit demi sedikit mulai berkurang. Oleh karenanya, pengelolaan SKA harus dilakukan sebaik-baiknya. Selama ini, pemanfaatan SKA Indonesia masih tidak optimal bagi kepentingan bangsa. Yang terjadi adalah banyak hasil bumi Indonesia yang dibawa ke luar negeri melalui perusahaan-perusahaan asing seperti Freeport atau Newmont. Demikian juga halnya dengan pemanfaatan hutan oleh swasta tanpa memperdulikan kelangsungan

---

<sup>42</sup>Hans. J. Morgenthau, & Kenneth W. Thompson, *op.cit*, hlm. 152.

<sup>43</sup>Menurut data BPS, jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil sensus tahun 2010 adalah sebanyak 237.556.363 orang, yang terdiri dari 119.507.580 laki-laki dan 118.048.783 perempuan. Sumber ini diambil dari *wikipedia.org*.

hutan yang gundul. Akibatnya, lingkungan alam Indonesia menjadi semakin rusak, sering terjadi banjir atau tanah longsor.

Dengan SKA yang melimpah, sebenarnya banyak pihak yang tergiur mendekati Indonesia dalam rangka mencapai kepentingan nasionalnya, termasuk negara-negara ASEAN. Singapura misalnya, memerlukan air bersih dan pasir laut dari Indonesia. Malaysia dan beberapa negara ASEAN lainnya juga memerlukan kayu atau bahkan gas bumi yang dimiliki oleh Indonesia. Belum lagi dari hasil kekayaan laut yang juga sangat melimpah. Oleh karenanya, masalah perbatasan perlu diperhatikan secara lebih maksimal lagi. Kerja sama militer dengan negara-negara ASEAN sangat penting dilakukan dalam rangka menjaga SKA Indonesia yang cukup besar tersebut, termasuk jika terjadi bencana alam yang sewaktu-waktu dapat terjadi di Indonesia. Optimalisasi peranan Indonesia dalam kerjasama militer ini sangat berguna mencegah terjadinya konflik di kawasan regional ASEAN yang juga dapat menciptakan ketahanan nasional.

#### **d. Aspek Ideologi**

Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai salah satu ciri globalisasi telah menyebabkan hilangnya batas-batas wilayah negara (*state borderless*). Batas-batas wilayah negara yang hilang ini menyebabkan berbagai ideologi dan gaya hidup asing, yang tidak sesuai dengan budaya luhur bangsa Indonesia, dapat dengan leluasa masuk hampir tanpa filter. Pengaruh ideologi dan budaya asing dapat menimbulkan kerawanan sosial akibat konflik kepentingan, mengingat masyarakat Indonesia menjadi semakin individualistis dengan gaya hidup yang hedonistis.

Tingkah laku sebagian masyarakat Indonesia memang banyak yang jauh dari nilai-nilai luhur Pancasila, terutama menguatnya sektarianisme dengan berbagai macam sentimen. Hilangnya rasa empati dalam diri sebagian besar masyarakat memicu pemaksaan kehendak dari golongan atau kelompok tertentu untuk melakukan kekerasan terhadap kelompok lain yang dianggap tidak sepaham.

Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya kesempatan masyarakat melakukan interaksi dengan pihak-pihak asing. Koordinasi yang baik melalui jalur-jalur pemerintahan, seperti kerjasama militer akan dapat mengeleminir tindakan-tindakan yang dapat membahayakan ideologi negara. Paling tidak, saling tukar menukar informasi yang dilakukan melalui kerjasama militer, memudahkan mengantisipasi gerakan-gerakan massif yang tidak sesuai dengan ideologi nasional bangsa Indonesia.

**e. Aspek Politik**

Reformasi tahun 1998 telah menimbulkan *euforia* demokrasi dan telah menyebabkan peningkatan partisipasi politik rakyat melalui berbagai media, diantaranya Pemilihan Umum Presiden/Wapres dan Kepala Daerah secara langsung. Ruang artikulasi kepentingan, baik melalui organisasi masyarakat (NGO/LSM) maupun kelompok kepentingan lainnya yang dibuka secara bebas telah menimbulkan konsekuensi aksi-aksi demonstrasi. Namun demikian, kondisi *euforia* demokrasi tidak didukung oleh pemahaman yang baik dalam berdemokrasi oleh sebagian besar elemen masyarakat, termasuk oleh para elit politik. Dampaknya, muncul kelompok kepentingan *anomik* yang menyebabkan terjadinya tindakan destruktif dan menjurus kriminal.

Kondisi politik yang carut marut seperti sekarang ini potensial mengundang intervensi asing dengan berbagai cara yang mungkin dilakukan. Instabilitas politik dan keamanan domestik Indonesia dapat saja mengganggu stabilitas politik dan keamanan kawasan ASEAN. Negara-negara ASEAN sebenarnya berkepentingan terhadap stabilitas politik dan keamanan dalam negeri Indonesia. Oleh karenanya, memperkuat saling pengertian antara para pejabat pemerintahan sangat diperlukan. Kepentingan terhadap faktor stabilitas politik dan keamanan Indonesia tersebut sebenarnya akan menjadi peluang bagi Indonesia untuk lebih mengoptimalkan peranannya dalam kerjasama militer negara-negara ASEAN.



**f. Aspek Ekonomi**

Setelah mengalami krisis selama hampir 10 tahun, ekonomi Indonesia saat ini mulai pulih. Pada awal tahun 2010 pertumbuhan ekonomi telah mencapai 6%<sup>44</sup>. Momentum ini sangat baik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemerataan hasil pembangunan. Berbagai program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan PNPM Mandiri telah dilaksanakan sebagai usaha mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi. Di lain pihak, pertumbuhan ekonomi yang membaik, meskipun belum memenuhi harapan, tetap perlu diwaspadai mengingat dapat berimplikasi pada tindakan kriminalitas oleh kelompok tertentu yang tidak ikut merasakan pertumbuhan ekonomi tersebut.

**g. Aspek Sosial Budaya**

UUD 1945 telah mengamanatkan 20% APBN untuk pendidikan. Namun saat ini masih ada jutaan anak yang tidak sekolah dan putus sekolah. Biaya sekolah sebenarnya bukan sekedar Biaya Operasional Sekolah (BOS), tetapi juga terkait dengan buku, seragam, sepatu dan transportasi. APBN saat ini baru mampu membiayai BOS sampai tingkat SMP saja, sedangkan biaya yang lain tetap dibebankan kepada wali murid.

Kondisi ini menyebabkan masih banyak anak yang tidak sekolah atau putus sekolah. Tingginya anak yang tidak sekolah atau putus sekolah menyebabkan terhambatnya pembangunan sosial-budaya sebagai upaya pembentukan karakter bangsa. Bangsa yang tidak berkarakter dengan mudah dapat dimanfaatkan oleh kelompok radikal melalui penggalangan anggota dengan dalih ketidakadilan. Kerjasama dengan negara-negara ASEAN dalam bidang pendidikan, termasuk pendidikan di bidang militer merupakan salah satu upaya untuk memperkuat daya tawar Indonesia dalam pergaulan regional di kawasan.

---

<sup>44</sup>Laporan Indikator Ekonomi Indonesia Tahun 2010 [www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id)

#### **h. Aspek Pertahanan Keamanan**

Minimnya anggaran pertahanan, terutama untuk kebutuhan alutsista menyebabkan kurang maksimalnya kemampuan operasional TNI. Pada saat ini, modernisasi peralatan militer merupakan keharusan yang tidak dapat ditunda. Modernisasi peralatan militer juga harus diberangi dengan modernisasi pengetahuan aparat militer dalam menggunakan peralatan yang dimiliki. Indonesia tidak lagi dapat mengandalkan semangat tempur saja dalam upaya melindungi segenap bangsa Indonesia. Modernisasi, peningkatan kualitas dan kuantitas alutsista merupakan langkah penting untuk mengoptimalkan peranan Indonesia dalam kerjasama militer negara-negara ASEAN.

Modernisasi alutsista dan meningkatkan kemampuan personel dapat dilakukan melalui kerjasama militer dengan negara-negara ASEAN. Tukar menukar personel untuk mengikuti pendidikan dan alih teknologi peralatan militer sangat mungkin dilakukan mengingat beberapa negara ASEAN memiliki peralatan militer yang lebih canggih. Peningkatan kemampuan dan postur militer Indonesia dapat menunjang terciptanya efek *deterent power* Indonesia terhadap negara ASEAN, yang juga dapat menangkal TAHG, salah satunya melalui kerjasama militer.

### **19. Peluang dan Kendala**

Mencermati pengaruh lingkungan strategis global, regional dan nasional yang telah dijelaskan terdahulu, terdapat beberapa peluang dan kendala optimalisasi peranan Indonesia dalam kerjasama militer negara-negara ASEAN guna memantapkan stabilitas politik dan keamanan regional dalam rangka ketahanan nasional.

#### **a. Peluang.**

- 1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tuntutan perdagangan bebas dapat mendorong investor asing menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini dapat memberikan peluang kepada negara-negara ASEAN untuk berinvestasi. Dengan demikian, negara-

negara ASEAN juga merasa perlu menjaga mantapnya politik keamanan regional, termasuk stabilitas politik domestik Indonesia.

- 2) Isu demokratisasi, HAM, lingkungan hidup dan terorisme yang menjadi isu internasional membuat negara-negara ASEAN merasa perlu meningkatkan kerjasama militer diantara mereka. Mengingat Indonesia telah dianggap sebagai tempat yang subur berkembangnya terorisme, ada kecenderungan negara-negara ASEAN akan memberikan bantuannya.
- 3) Posisi geografis yang strategis dapat memberi peluang kepada Indonesia untuk dipercaya mengelola lalu lintas perdagangan dunia, khususnya lalu lintas laut secara lebih optimal. Mengingat negara-negara ASEAN juga berkepentingan dengan hal itu, maka peluang Indonesia untuk lebih berperan secara optimal akan terbuka lebar.
- 4) Kemajuan Teknologi Informasi memberikan kemudahan akses pencarian informasi dengan cepat dan akurat, sehingga akan memudahkan koordinasi dalam berbagai bentuk kerjasama militer, baik menanggulangi kejahatan trans-nasional maupun kejahatan kemanusiaan lainnya.

**b. Kendala.**

- 1) Pemerintah Indonesia diliputi ketidakpastian politik. Pemerintahan Presidensial yang dipilih ternyata dalam kenyataannya lebih menjurus kepada parlementer, sehingga pemerintah sering ragu mengambil keputusan, misalnya menaikkan anggaran militer yang dapat menjadi titik tolak pintu masuk untuk mengoptimalkan peran Indonesia dalam kerjasama militer negara-negara ASEAN.
- 2) Euforia reformasi 1998 yang salah satunya menuntut reformasi di tubuh TNI, ternyata sudah kehilangan arah. Seharusnya militer tetap ditempatkan sesuai dengan perannya secara proporsional seperti yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) UU Tentara Nasional.
- 3) Dengan jangkauan wilayah yang sangat luas dan tidak diimbangi dengan kepemilikan alutsista yang memadai, dapat menyulitkan

Indonesia dalam menjalin kerjasama militer. Minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki akan dapat dipandang oleh negara-negara ASEAN bahwa Indonesia sebenarnya tidak dapat berperan optimal dalam kerjasama sama yang dilakukan.

- 4) Reformasi Indonesia telah mengesampingkan peranan industri strategis yang pernah berjaya pada masa lalu. Sebenarnya, dengan berkembangnya industri strategis, akan dapat menjadikan negara-negara ASEAN memandang Indonesia sebagai partner yang harus diperhitungkan dalam pengembangan industri strategis, termasuk industri persenjataan. Saat ini, SDM bangsa Indonesia yang dahulu menjadi andalan di beberapa industri strategis yang dimiliki, justru dimanfaatkan oleh negara-negara asing.
5. Kuatnya ikatan dan jaringan negara-negara Persemakmuran dapat menyebabkan loyalitas beberapa negara ASEAN yang menjadi anggota Persemakmuran akan berkurang dalam kerjasama militer negara-negara ASEAN. Konsekuensinya, optimalisasi peranan Indonesia semakin sulit, mengingat negara-negara ASEAN yang menjadi anggota Persemakmuran merasa lebih *enjoy* dan nyaman membangun kerjasama militer dengan sesama anggota Persemakmuran. Bagaimanapun, Indonesia dapat dianggap sebagai ancaman. Bahkan, tidak menutup kemungkinan, anggota Persemakmuran di luar ASEAN berusaha menghalangi optimalisasi peranan Indonesia tersebut.

=====

**BAB V**

**OPTIMALISASI PERANAN INDONESIA DALAM KERJASAMA MILITER  
NEGARA-NEGARA ASEAN GUNA MEMANTAPKAN STABILITAS POLITIK  
DAN KEAMANAN REGIONAL DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL  
YANG DIHARAPKAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN**

**20. Umum**

Di kawasan Asia Tenggara, khususnya ASEAN, Indonesia termasuk negara yang paling besar dilihat dari luas wilayah dan jumlah penduduk. Dengan potensi tersebut, Indonesia memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin ASEAN. Dalam berbagai kerjasama, Indonesia selalu menunjukkan perannya secara signifikan, paling tidak dengan selalu melibatkan diri dalam setiap pertemuan untuk membuat konsep atau menentukan program-program organisasi. Indonesia juga sering memfasilitasi berbagai pertemuan untuk membicarakan konsep-konsep yang akan disepakati bersama. Peranan Indonesia tersebut telah diakui oleh negara-negara anggota ASEAN dengan adanya anggapan bahwa Indonesia adalah *The Big Brother* pada masa pemerintahan Suharto. Tentunya, peranan Indonesia dalam forum ASEAN telah membawa manfaat tersendiri bagi pencapaian kepentingan nasional Indonesia di forum-forum internasional lainnya.

Amerika Serikat adalah negara kuat dalam bidang militer, sehingga dijuluki sebagai polisi dunia (*globo cop*). Indonesia memang tidak perlu menjadi seperti AS dalam mencapai kepentingannya nasionalnya. Namun demikian, menciptakan *influence* (pengaruh) merupakan cara yang perlu dilakukan untuk mengamankan kepentingan nasional bangsa Indonesia<sup>45</sup>. Paling tidak, di lingkungan ASEAN Indonesia harus menjadi negara yang disegani dan dihormati karena kredibilitas orisinil yang dimilikinya. Dengan cara demikian, peranan Indonesia dalam kerjasama militer negara-negara

---

<sup>45</sup>Sukarno memilih cara-cara konfrontatif terhadap kekuatan besar dalam upaya meningkatkan pengaruh Indonesia di dunia Internasional. Sementara Suharto lebih memilih cara-cara kerjasama kepada semua pihak untuk mencapai Indonesia yang dihormati di dunia Internasional. Pandangan Suharto terhadap kerjasama internasional, lebih lanjut dapat dilihat dalam Wiranto, *7 Tahun Menggali Pemikiran dan Tindakan Pak Harto*, Jakarta: PT. Citra Kharisma Bunda, 2011, hlm. 238-310.

ASEAN dapat dioptimalkan. Jika ada satu pihak dapat menjadi *leader* yang disegani, maka memantapkan politik dan keamanan regional pun akan lebih mudah dicapai. Jika Indonesia dapat memainkan peranan tersebut, maka ketahanan nasional Indonesia juga dapat menjadi tangguh sekali.

## **21. Optimalisasi Peranan Indonesia Dalam Kerjasama Militer Negara-Negara ASEAN Yang Diharapkan**

Selama ini, peranan Indonesia dalam kerjasama militer dengan negara-negara ASEAN hanya terbatas pada kerjasama yang memiliki kesetaraan sesama negara-negara ASEAN. Hal ini merupakan konsekuensi dari sebuah interaksi antar negara, yang memiliki kesetaraan dalam hubungannya dengan negara lain. Dalam setiap kerjasama, memang telah ada ketentuan formal tentang *sovereign equity* (kesamaan kedaulatan) bagi setiap negara<sup>46</sup>. Dalam Piagam ASEAN, prinsip-prinsip tersebut dikembangkan lagi menjadi beberapa poin, yang juga memuat tentang perlunya menegakkan prinsip *sovereign equity*<sup>47</sup>. Namun demikian, dalam setiap interaksi, biasanya hal-hal yang bersifat informal juga dapat dilakukan, tergantung bagaimana diplomasi sebuah negara.

Adapun optimalisasi peranan Indonesia dalam kerjasama militer negara-negara ASEAN yang diharapkan berupa :

- a. Meningkatnya frekuensi patroli di daerah perbatasan, dengan cara menambah kekuatan, baik kualitas maupun kuantitas peralatan, perlengkapan dan personel yang ada dalam kerjasama MALSINDO (*Malacca Straits Coordinated Patrol*).

Langkah tersebut penting dilakukan untuk menambah intensitas patroli terkordinasi di wilayah Selat Malaka. Jika ide untuk meningkatkan intensitas patroli terkordinasi di Selat Malaka, maka

---

<sup>46</sup>Sebagai organisasi Regional, ASEAN juga menganut prinsip *sovereign equity*, yang dituangkan dalam Prinsip-prinsip utama ASEAN, yakni, 1. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara, 2. Hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas daripada campur tangan, subversif atau koersi pihak luar, 3. Tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama anggota, 4. Penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai, 5. Menolak penggunaan kekuatan yang mematikan dan Kerjasama efektif antara anggota.

<sup>47</sup>Piagam ASEAN yang ditandatangani pada tanggal 20 November 2007 di Singapura menegaskan juga tentang prinsip ini, lihat Pasal 2 ayat (2) Piagam ASEAN.

secara tidak langsung Indonesia akan menjadi *leader* dalam patroli tersebut. Semakin sering dan semakin besar pasukan yang digelar di Selat Malaka, semakin terlihat juga kekuatan militer Indonesia di mata negara-negara ASEAN, khususnya negara yang tergabung dalam Malsindo. Dengan menambah intensitas patroli dan meningkatkan kekuatan militer dalam patroli terkordinasi, Indonesia juga dapat menjaga batas-batas wilayahnya secara tegas.

b. Meningkatnya Kerjasama Militer Indonesia - Singapura

Langkah yang sama juga dapat dilakukan oleh Indonesia dalam kerjasama militer dengan Singapura. Unjuk gelar kekuatan militer yang lebih sering dengan tingkat kualitas dan kuantitas alutsista dan personel yang memadai, secara psikologis akan dapat mempengaruhi pandangan Singapura terhadap Indonesia. Tentunya bukan dalam kerangka invasi atau ekspansi, melainkan dalam rangka menciptakan efek *deterent* guna melakukan diplomasi di bidang yang lain.

Dalam bidang pendidikan, Indonesia diharapkan lebih banyak lagi mengirimkan personelnnya untuk mengikuti pendidikan di Singapura, baik tentang teknis kemiliteran maupun pengembangan persenjataan. Hal ini perlu dilakukan mengingat Singapura memiliki kekuatan militer yang cukup canggih. Dengan optimalisasi yang dilakukan, pihak Indonesia dapat melakukan alih teknologi persenjataan tempur dengan pihak Singapura. Optimalisasi bisa juga dilakukan dengan kerjasama dalam bidang riset alutsista. Riset bersama tentang pengembangan alutsista juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas peralatan militer Indonesia.

c. Meningkatnya Latgabma Malindo Darsasa (Latihan Gabungan Bersama Malaysia-Indonesia Samudera dan Angkasa) yang dipimpin dan difasilitasi oleh Indonesia.

Secara kasat mata, Tentara Diraja Malaysia sering melakukan manuver-manuver di wilayah NKRI. Insiden antara kapal Indonesia dan Malaysia di blok Ambalat menunjukkan adanya provokasi kekuatan militer Malaysia. Selama ini, insiden seperti itu hanya selesai dengan

pertemuan pejabat tinggi. Namun demikian, insiden serupa masih sering terjadi. Peristiwa penangkapan nelayan tradisional Indonesia yang dituduh memasuki wilayah Malaysia, atau penangkapan pegawai patroli laut dari Kementerian Kelautan RI beberapa waktu lalu mencerminkan adanya tindakan yang mengabaikan hukum Internasional tentang wilayah perbatasan. Beberapa kesepakatan internasional sering diabaikan oleh Malaysia, termasuk prinsip-prinsip dalam UNCLOS atau ZEE.

Insiden perbatasan memang sering terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Prinsip-prinsip yang tertuang dalam Deklarasi Bangkok yang dikuatkan oleh Piagam ASEAN nampaknya hanya dijadikan oleh Malaysia untuk sedikit demi sedikit menggerogoti wilayah NKRI. Pulau Sipadan dan Ligitan diselesaikan di Mahkamah Internasional dengan kemenangan Malaysia. Sipadan dan Ligitan dijadikan Malaysia sebagai preseden untuk mencaplok wilayah bagian NKRI. Jika ini berlangsung terus menerus, maka Malaysia dapat mengklaim dirinya sebagai negara kepulauan yang berhak pula menerapkan ZEE. Hal ini berarti akan memperluas wilayah laut Malaysia yang bersinggungan dengan wilayah NKRI dan dapat menjangkau pulau-pulau terdepan NKRI.

d. Meningkatkan Intensitas Forum *Joint Bilateral Commission Indonesia-Philippines*.

Masalah Mindanao, Philipina Selatan, dapat dijadikan pintu masuk bagi Indonesia untuk mengoptimalkan perannya dalam kerjasama militer dengan Philipina. Patroli bersama di perbatasan atau tukar menukar informasi intelijen dapat meminimalisir arus lalu lintas kalangan kelompok pemberontak Mindanau yang mungkin saja memanfaatkan wilayah NKRI untuk melakukan aktivitasnya. Dengan adanya manfaat bagi Philipina, optimalisasi peranan Indonesia dalam kerjasama militer ASEAN akan semakin besar. Indonesia dapat memperoleh dukungan Philipina jika Indonesia ingin peran optimal dalam kerjasama yang dilakukan.



Bagi Indonesia sendiri, dengan optimalisasi peranan tersebut, Indonesia juga dapat mencegah bebasnya aktivitas pihak-pihak yang berkeinginan mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri, terutama masalah terorisme. Tentunya, jika Philipina dan Indonesia melakukan hal yang saling menguntungkan, maka politik dan keamanan regional akan mudah terwujud di kawasan regional ASEAN.

- e. Meningkatnya Kerjasama Militer antara Indonesia dan Thailand, Indonesia dan Vietnam, Indonesia dan Brunnai Darussalam, Indonesia dan Kamboja serta Indonesia dan Myanmar.

Pada dasarnya, langkah yang sama juga harus dilakukan oleh Indonesia untuk mengoptimalkan peranannya dalam kerjasama militer dengan kelima negara negara ASEAN lainnya, yakni dengan meningkatkan intensitas kegiatan dan berupaya untuk menunjukkan kesiapan kekuatan militer Indonesia kepada negara-negara tersebut. Sampai saat ini, tidak ada masalah yang krusial menyangkut perbatasan dengan kelima negara tersebut. Oleh karenanya, peluang Indonesia untuk mengoptimalkan peranannya akan lebih mudah dilakukan. Indonesia dapat memberikan kesempatan kepada kelima negara tersebut untuk mengirimkan personelnnya berlatih atau mengikuti pendidikan di Indonesia. Indonesia dapat berperan lebih aktif untuk masalah Pattani, Thailand Selatan. Demikian juga dengan beberapa negara ASEAN yang berpolemik dalam masalah kepulauan Spratly di LCS dengan China. Dengan demikian, Indonesia dapat diakui sebagai pihak yang lebih mampu dalam melakukan kerjasama di bidang militer.

- f. Terwujudnya dan meningkatnya kerjasama militer dengan negara-negara non ASEAN se-kawasan.

Dalam upaya memantapkan politik dan keamanan regional, Indonesia juga diharapkan dapat mengoptimalkan kerjasama militer dengan negara-negara tetangga non ASEAN. Mengingat modal dasar kerjasama militer yang dilakukan oleh Indonesia dengan beberapa negara ASEAN dianggap sukses meminimalisir konflik, tentu hal itu juga harus dilakukan dengan negara-negara tetangga non ASEAN

dalam kawasan Asia Tenggara, terutama yang berbatasan langsung dengan Indonesia, seperti PNG, Australia, India, Palau dan Timor Leste. Jika Indonesia dapat menggandeng secara efektif negara-negara tersebut, maka posisi tawar Indonesia terhadap negara-negara ASEAN untuk mengoptimalkan perannya akan lebih mudah dilakukan karena melihat Indonesia memiliki kerjasama yang baik dengan negara-negara non ASEAN se-kawasan.

Selain itu, kerjasama yang dilakukan juga akan dapat meminimalisir terjadinya kejahatan trans-nasional yang melintasi perbatasan antara Indonesia dan negara-negara non ASEAN tersebut. Hal ini berarti juga telah mengamankan keutuhan NKRI dan dapat menciptakan suasana yang kondusif bagi Indonesia dan kawasan ASEAN lainnya. Jika hal ini dapat dilakukan secara maksimal, maka upaya memantapkan politik dan keamanan regional akan dapat dicapai.

## **22. Kontribusi Optimalisasi Peranan Indonesia Dalam Kerjasama Militer Negara-negara ASEAN Guna Memantapkan Stabilitas Politik dan Keamanan Regional dan Ketahanan Nasional**

### **a. Kontribusi Optimalisasi Peranan Indonesia Dalam Kerjasama Militer negara-negara ASEAN Guna Memantapkan Stabilitas Politik dan Keamanan Regional.**

Optimalisasi peranan berarti upaya untuk meningkatkan peranan yang telah dilakukan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Indonesia telah melakukan peranan yang cukup signifikan dalam kerjasama militer negara-negara ASEAN. Tentunya, setiap tindakan yang dilakukan, terutama dalam kerjasama militer akan ada kontribusi terhadap upaya menciptakan suasana yang kondusif terhadap kawasan Asia Tenggara. Selama ini, tidak terjadi konflik militer di kawasan regional ASEAN. Beberapa kontribusi optimalisasi peranan Indonesia dalam kerjasama militer negara-negara ASEAN diantaranya adalah sebagai berikut :

1). Dapat meminimalisir munculnya mispersepsi antara sesama negara ASEAN

Dalam setiap kerjasama, interaksi antara sesama anggota selalu dilakukan. Hal ini dapat mengurangi salah pengertian diantara sesama anggota. Demikian juga halnya dengan kerjasama militer, juga dapat membangun saling pengertian sesama eksponen militer masing-masing negara. Saling pengertian antara sesama kekuatan militer akan lebih memudahkan membuka dialog antara pihak-pihak yang berkepentingan.

Terkait dengan optimalisasi peranan Indonesia, diharapkan dialog yang terbuka akan lebih sering dilakukan. Kondisi tersebut dapat menumbuhkan saling pengertian yang lebih mendalam, mengingat luas perbatasan Indonesia dengan negara-negara regional ASEAN sangat panjang. Semakin besar peranan Indonesia, semakin banyak pula dialog dan saling pengertian tercipta dalam negara-megara ASEAN. Dengan dialog yang intens atas inisiatif Indonesia, misalnya, semua persoalan politik dan keamanan yang muncul diantara sesama negara ASEAN akan dapat dicarikan penyelesaiannya secara damai.

2). Penggunaan Kekuatan Militer Dapat Dieliminir

Konflik terbuka seringkali melibatkan kekuatan militer. Oleh karenanya, optimalisasi peranan Indonesia dalam kerjasama militer, akan dapat mengurangi konflik terbuka. Pihak yang memiliki peranan yang lebih besar, tentunya akan dapat lebih menahan diri untuk tidak berkonflik. Sebaliknya, pihak lain pun akan merasa segan melakukan tindakan yang dapat menyinggung perasaan negara lain yang dapat memancing penggunaan kekuatan militer yang dapat mengancam stabilitas politik dan keamanan regional.

3). Tukar Menukar Informasi Intelijen Lebih Mudah

Dengan optimalisasi peranan Indonesia dalam kerjasama militer, segala bentuk terkait pemanfaatan kekuatan militer akan lebih sering dilakukan. Mengingat kawasan Asia Tenggara

merupakan kawasan yang sangat strategis bagi keamanan perdagangan dunia, terutama melalui lalu lintas laut, maka potensi munculnya tindakan kriminal sangat tinggi. Optimalisasi peranan Indonesia akan dapat menambah intensitas pertukaran informasi intelijen terkait dengan masalah keamanan dan kejahatan lintas negara. Dengan demikian, potensi gangguan politik dan keamanan regional dapat diminimalisir. Upaya penyelundupan senjata dapat dicegah melalui kerjasama yang lebih baik.

#### 4). Kohesifitas ASEAN Lebih Mudah Diwujudkan

Peranan Indonesia yang optimal dalam kerjasama militer negara-negara ASEAN juga dapat menimbulkan efek *spillover* dalam kerjasama di bidang non militer. Dengan adanya peluberan kerjasama di bidang lain, kondisi politik regional ASEAN akan dapat dimantapkan. Optimalnya peranan Indonesia dalam kerjasama militer dapat menimbulkan rasa “segan” negara ASEAN yang lain, sehingga kohesifitas sesama negara-negara ASEAN lebih mudah diwujudkan melalui berbagai macam bidang kerjasama. Berbagai kerjasama dalam bidang yang lain akan lebih mudah untuk dibicarakan guna memantapkan politik dan keamanan regional.

#### 5). Pengaruh Indonesia Yang lebih Besar memudahkan mencari Solusi Berbagai Masalah

Dalam setiap kerjasama antar negara, prinsip kesamaan dan kesetaraan selalu menjadi kesepakatan bersama. Namun demikian, jika Indonesia dapat mengoptimalkan perannya di dalam kerjasama militer di ASEAN, maka Indonesia akan dapat meningkatkan pengaruhnya terhadap negara-negara lain di lingkungann ASEAN. Pengaruh yang besar ini dapat mempermudah dalam mencari solusi berbagai masalah-masalah yang muncul.

### **b. Kontribusi Memantapkan Stabilitas Politik dan Keamanan Regional Terhadap Ketahanan Nasional**

Mantapnya kondisi politik dan keamanan regional ASEAN memiliki kontribusi terhadap ketahanan nasional Indonesia. Adapun

kontribusi politik dan keamanan yang mantap terhadap gatra-gatra ketahanan nasional Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut :

1). Aspek Geografi

Dengan letak geografis yang sangat strategis, Indonesia memerlukan stabilitas politik dan keamanan yang mantap di kawasan. Hal ini penting untuk tetap menjaga keutuhan wilayah NKRI. Kondisi politik dan keamanan kawasan yang tidak mantap akan dapat mengganggu integritas teritorial NKRI melalui berbagai macam tindakan-tindakan gangguan keamanan lintas negara, berupa pelanggaran batas wilayah NKRI.

2). Aspek Demografi

Jumlah penduduk yang sangat besar dapat menjadi potensi yang bermanfaat atau sebaliknya dapat mengganggu stabilitas keamanan domestik. Dengan mantapnya kondisi politik dan keamanan regional ASEAN, Indonesia akan lebih mudah dalam mengelola penduduknya yang cukup besar tersebut. Gangguan lintas batas, *human trafficking* atau kejahatan lintas batas lainnya akan dapat diantisipasi dan dicegah sedini mungkin hanya dengan kondisi kestabilan politik dan keamanan regional yang mantap.

3). Aspek Sumber Kekayaan Alam (SKA)

Pengelolaan SKA merupakan kunci pokok suksesnya pembangunan dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Keamanan terhadap obyek vital SKA Indonesia akan dapat dijaga secara baik jika kondisi politik keamanan regional juga dapat terjaga dengan mantap. Dengan demikian, Indonesia dapat memanfaatkan SKA yang dimiliki secara maksimal dan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, tidak dicuri atau diklaim oleh negara-negara lain, termasuk negara-negara ASEAN.

4). Aspek Ideologi

Ketahanan ideologi sering diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan ideologi bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan kekuatan nasional

dalam menghadapi dan mengatasi segala TAHG dari luar atau dari dalam, langsung atau tidak langsung dalam rangka menjamin kelangsungan kehidupan ideologi bangsa dan negara Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kondisi mental bangsa yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa, yang pengamalannya harus dilaksanakan secara konsisten dan berlanjut. Mantapnya stabilitas politik dan keamanan regional ASEAN dapat membantu bangsa Indonesia dalam mempertahankan ketahanan ideologinya dari berbagai pengaruh ideologi asing yang berkembang di kawasan ASEAN.

#### 5). Aspek Politik

Ketahanan dari aspek politik dapat diartikan sebagai sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum dan mekanisme politik yang memungkinkan adanya perbedaan pendapat. Untuk mewujudkan ketahanan politik, bangsa Indonesia memerlukan kehidupan politik yang sehat dan dinamis, mengandung kemampuan untuk memelihara stabilitas politik yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Stabilitas politik dan keamanan regional yang mantap dapat menciptakan kondisi politik domestik yang lebih stabil.

#### 6). Aspek Ekonomi

Ketahanan ekonomi tercermin dalam kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing tinggi dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dengan stabilitas politik dan keamanan regional ASEAN yang mantap, Indonesia akan lebih mudah mewujudkan sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai yang telah berkembang dalam masyarakat.

#### 7). Aspek Sosial Budaya

Ketahanan sosial budaya tercermin dalam kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional, yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan

kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini akan dapat menangkal penetrasi asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional. Untuk mempertahankan tetap tegaknya nilai-nilai tersebut, kondisi politik dan keamanan regional yang mantap sangat diperlukan. Instabilitas politik dan keamanan regional akan dapat mempengaruhi kondisi politik dan keamanan nasional, yang pada akhirnya dapat mengganggu terciptanya perwujudan nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia.

#### 8). Aspek Pertahanan dan Keamanan (HANKAM)

Aspek pertahanan dan keamanan menjadi sangat penting dalam membicarakan pembangunan bangsa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Ketahanan hankam tercermin dalam perwujudan daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan Negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk TAHG. Oleh karenanya, Indonesia berkepentingan terhadap terciptanya stabilitas politik dan keamanan regional yang mantap.

### **23. Indikator Keberhasilan**

Indikator keberhasilan optimalisasi peranan Indonesia dalam kerjasama militer negara-negara ASEAN guna memantapkan stabilitas politik dan keamanan regional dalam rangka ketahanan nasional adalah :

#### **a. Tuntasnya Masalah Batas-Batas negara Indonesia dengan Negara-Negara Tetangga.**

Masalah batas negara ini menjadi faktor yang sangat signifikan kalau kita membahas optimalisasi peranan Indonesia dalam kerjasama militer negara-negara ASEAN. Memang, tugas pokok TNI tidak mengurus masalah perbatasan, namun UU No. 34 Tahun 2004

tentang Tentara Nasional mengamanatkan kepada TNI untuk melakukan tugas pokoknya dengan cara **mengamankan wilayah perbatasan**. Hal ini terkait dengan tugas pokok TNI seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1), yakni Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Dengan mengacu kepada tugas pokoknya, TNI berkepentingan terhadap penuntasan batas-batas negara agar dapat menjalankan tugasnya dengan cermat dan tepat. Jika batas-batas negara tidak dituntaskan, maka tugas untuk mengamankan perbatasan negara dan menjaga keutuhan wilayah NKRI akan semakin sulit. Tindakan TNI yang tidak akurat karena tidak jelasnya batas-batas negara dapat mengakibatkan menurunnya kepercayaan negara-negara lain terhadap TNI. Dampaknya, TNI akan mengalami kendala dalam mengoptimalkan peranannya dalam kerjasama militer negara-negara ASEAN

#### **b. Meningkatnya Alokasi Anggaran Pertahanan**

Alokasi anggaran sangat menentukan bagi peningkatan kemampuan operasional pertahanan. Dengan meningkatnya alokasi anggaran pertahanan, militer Indonesia dapat meningkatkan kemampuan peralatan dan perlengkapannya serta meningkatkan keterampilan personel dalam memanfaatkan peralatan dan perlengkapan modern. Dengan demikian, negara-negara ASEAN tidak lagi memandang rendah kekuatan militer Indonesia. Selama ini, kondisi peralatan dan perlengkapan yang sangat terbatas, membuat Indonesia tidak leluasa untuk menginisiasi berbagai macam bentuk kerjasama militer negara-negara ASEAN.

#### **c. Terciptanya Stabilitas Politik Dalam Negeri.**

Stabilitas politik dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi upaya membangun kerjasama luar negeri. Beberapa negara yang



memiliki stabilitas politik yang mantap akan lebih mudah menjalin hubungan dengan negara lain. Lebih dari itu, negara yang kondisi politik dalam negerinya stabil, akan dihormati oleh negara lain, sehingga untuk menjadi “*leader*” juga akan lebih mudah.

Dengan stabilitas yang dimiliki, Indonesia tidak lagi diwarnai kontroversi perlu atau tidaknya memberikan porsi yang lebih besar bagi kepentingan peningkatan kemampuan militer. Sejak reformasi 1998, pemerintah Indonesia cenderung ragu-ragu untuk menempatkan posisi TNI secara proporsional karena banyaknya kekuatan politik dan sebagian kecil masyarakat tapi bersuara “nyaring”, yang apriori terhadap TNI. Stabilitas politik dalam negeri dapat mendukung pemerintah untuk lebih leluasa menentukan kebijakan pengembangan militer, termasuk optimalisasi peran Indonesia dalam kerjasama militer negara-negara ASEAN.

Selain itu, negara-negara lain akan percaya dengan kemampuan Indonesia untuk mengelola kerjasama militernya dengan siapapun, termasuk dengan negara-negara ASEAN jika kondisi politik dalam negeri menunjukkan kestabilan. Instabilitas politik dalam negeri berpotensi mengundang keraguan negara lain atas kemampuan Indonesia karena dianggap tidak dapat mengurus persoalan dalam negerinya.

**d. Kalangan Militer ASEAN Semakin banyak yang Memahami Manajemen Penanggulangan Bencana Alam.**

Mengingat kondisi wilayah negara-negara ASEAN yang rawan bencana alam, maka diperlukan antisipasi setiap saat untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana. Selama ini, kemampuan teknis militer tidak diragukan lagi, terutama dalam menghadapi masa tanggap darurat. Kemampuan personel dan peralatan yang dimiliki semakin mempermudah pihak militer melakukan aktivitasnya. Hanya saja, terkait dengan manajemen bencana alam secara konferehensif, terutama dalam menangani persoalan-persoalan pasca bencana, nampaknya belum maksimal dimiliki oleh kalangan

militer ASEAN. Oleh karenanya, pemahaman terhadap manajemen penanggulangan bencana alam ini perlu diberikan untuk menambah kemampuan kalangan militer ASEAN dalam bekerjasama.

Bagi Indonesia, penanggulangan bencana alam merupakan amanat UU No, 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pasal 7 ayat (2).b. poin 12 menyebutkan tentang bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, **TNI membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.** Oleh karenanya, militer Indonesia juga perlu meningkatkan kualitas pemahaman dan kuantitas personel yang memahami manajemen penanggulangan bencana alam. Dengan pemahaman manajemen yang memadai, militer Indonesia dapat menjadi contoh bagi militer negara-negara ASEAN dalam menanggulangi bencana alam dan kegiatan kemanusiaan lainnya. Dalam konteks inilah, Indonesia dapat mengoptimalkan peranannya dalam kerjasama militer negara-negara ASEAN.

=====

**BAB VI**  
**KONSEPSI**  
**OPTIMALISASI PERANAN INDONESIA DALAM KERJASAMA MILITER**  
**NEGARA-NEGARA ASEAN GUNA MEMANTAPKAN STABILITAS**  
**POLITIK DAN KEAMANAN REGIONAL DALAM RANGKA**  
**KETAHANAN NASIONAL**

**24. Umum**

DALAM sejarah hubungan internasional, kekuatan militer selalu menjadi andalan untuk memperoleh pengakuan dari negara lain. Dalam literatur hubungan internasional, kesiagaan militer merupakan salah satu unsur dari kekuatan nasional<sup>48</sup>. Jika membicarakan kesiagaan militer, maka ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan, yakni kecanggihan teknologi militer yang dimiliki, manajemen kemilitirennya dan kuantitas serta kualitas persenjataan. Dengan demikian, kesiagaan militer suatu negara dapat dilihat dari bagaimana kualitas dan kuantitas persenjataan yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan. Faktanya, sejarah telah membuktikan bahwa kesiagaan militer menjadi penting untuk menciptakan *influence* atau pengaruh sebuah negara terhadap negara lain.

Perimbangan kekuatan yang terjadi dalam beberapa abad ini di kanah politik internasional dapat dilihat sebagai gambaran perimbangan kekuatan militer. Kekuatan militer selalu menjadi ujung tombak dalam mendukung keberhasilan diplomasi. Sejarah Eropa telah memperkuat asumsi bahwa kekuatan militer sangat menentukan keberhasilan diplomasi sebuah negara. Pada saat terjadinya Perang Dunia (PD) I, peran militer kembali terlihat dalam menciptakan kondisi dunia yang diinginkan, misalnya kelahiran Liga Bangsa-Bangsa (*The League of Nations*), Bahkan, saat PD II pun, kekuatan militer dapat memaksa dunia untuk menciptakan tata dunia seperti yang diinginkan oleh negara-negara pemenang perang. Piagam

---

<sup>48</sup>Selain kesiagaan militer, ada beberapa unsur kekuatan nasional lainnya, yakni Geografi, Sumber Daya Alam, Kemampuan Industri, Penduduk, Karakter Nasional, Moral Nasional, Kualitas Diplomasi dan Kualitas pemerintahan. Lihat Hans, J. Morgenthau & Kenneth W. Thompson, *op-cit*, hlm. 123-179.

PBB memberikan gambaran yang nyata bahwa dominasi negara pemenang perang dapat mewarnai aturan main PBB. Hak veto di DK PBB membuktikan bahwa sesungguhnya kekuatan militer memiliki peranan penting dalam percaturan internasional.

Pasca kelahiran PBB tanggal 24 Oktober 1945, dunia diwarnai oleh perang dingin yang melibatkan dua negara adi daya, yakni Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet (US). Pada masa itu, ideologi memang menjadi isu penting dalam memperebutkan pengaruh. Namun demikian, perimbangan kekuatan militer yang sangat ketat tetap membayangi perang ideologi tersebut. Selain itu, aroma perlombaan senjata juga sangat terasa, terutama perlombaan peluru kendali jarak jauh dan menengah yang berhulu ledak nuklir. Masing-masing pemimpin blok berusaha memperbesar pengaruhnya dengan berbagai cara, baik dengan cara diplomasi tingkat tinggi di forum-forum organisasi internasional, maupun dengan tekanan militer. Kampanye perlucutan senjata yang gencar dilakukan oleh PBB hanya dianggap sebagai slogan kosong bagi negara-negara berkembang. Fenomena ini kembali membuktikan bahwa kekuatan militer masih tetap menjadi primadona dalam interaksi antar negara.

Setelah Perang Dunia II, dunia diwarnai oleh perang dingin (*cold war*), yang melibatkan dua negara adi daya, yakni Amerika Serikat (AS) di pihak blok Barat dan Uni Soviet (US) di blok Timur. Pada masa itu, ideologi menjadi isu penting dalam memperebutkan pengaruh oleh pemimpin blok. Namun demikian, perimbangan kekuatan militer yang ketat (*the tight bipolarity balance of power*) juga sangat kentara. Selain itu, warna perlombaan senjata juga terasa sangat kental, terutama senjata nuklir. Masing-masing pemimpin blok berusaha memperbesar pengaruhnya di dunia internasional dengan berbagai cara, baik dengan melakukan diplomasi tingkat tinggi di forum-forum organisasi internasional, maupun melakukan tekanan-tekanan militer. Bahkan, negara-negara pemimpin blok yang menjadi anggota tetap DK PBB tidak segan-segan memanfaatkan hak vetonya untuk menentang isu-isu yang dianggap bertentangan dengan kepentingan nasional mereka. Kampanye perlucutan

senjata oleh PBB hanya dianggap slogan kosong bagi negara-negara berkembang karena tidak pernah digubris oleh negara-negara adi daya.

Berakhirnya perang dingin yang ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin dan bubarnya negara US dan Pakta Warsawa telah menggeser isu politik keamanan ke isu non politik keamanan. Namun, AS sebagai pemimpin blok Barat tetap saja menjadikan kekuatan militer untuk memuluskan setiap diplomasinya. Isu-isu tentang HAM, demokratisasi dan lingkungan hidup yang diusung oleh AS, selalu diwarnai dengan tindakan-tindakan yang menggunakan kekuatan militer. Upaya untuk menjadikan negara-negara Timur Tengah menjadi lebih demokratis menurut pandangan AS, selalu didahului dengan penggunaan kekuatan militer. Irak dan Libya merupakan contoh nyata adanya tindakan militer AS untuk memuluskan jalan mencapai kepentingan nasionalnya, yakni menguasai kedua negara tersebut secara tidak langsung. Oleh karenanya, pengaruh sebuah negara terhadap negara lain memang ditentukan oleh kekuatan nasionalnya, terutama kekuatan militer yang dimiliki. Kekuatan militer sangat mendukung bagaimana sebuah negara mengelola unsur-unsur kekuatan nasional lainnya. Dengan pengelolaan kekuatan nasional yang efektif, maka *influence* dalam pergaulan internasional akan lebih mudah diperoleh suatu negara terhadap negara lain.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, kekuatan militer juga sering digunakan sebagai kekuatan untuk menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan, khususnya terkait dengan bencana alam. Pengertian keamanan juga mengalami pergeseran, dari keamanan tradisional yang bernuansa militeristik ke keamanan humanis yang berdimensi non militer. Muladi, dalam ceramahnya menyebutkan bahwa definisi keamanan di tingkat nasional (*national level*) berkaitan dengan tujuan kebijakan keamanan (*security policy*) yang mencakup konsolidasi demokrasi, pencapaian keadilan sosial, pembangunan ekonomi, dan suatu lingkungan hidup yang aman, pengurangan signifikan tingkat kejahatan, kekerasan, instabilitas politik. Di tingkat internasional (*international level*), tujuan kebijakan keamanan mencakup usaha mempertahankan kedaulatan,

integritas teritorial, kesatuan nasional dan kemerdekaan politik. Di era globalisasi yang multidimensional selalu tercipta wilayah-wilayah kelabu (*grey areas*)<sup>49</sup>.

Selama ini, ancaman bahaya keamanan selalu diartikan berdimensi keamanan militer. Pengertian keamanan ini mengandung makna yang bersifat tradisional, konvensional, simetrik, "*state centrism*", dominasi aktor negara atau pemerintah, menonjolkan "*deterrence, power balancing and military strategy*" yang melekat pada "*nation's security*", menangkalkan agresi (*deter or defeat*), fokus pada pembangunan kekuatan nasional atau militer. Kondisi ini biasanya berakibat pada kecenderungan munculnya perlombaan senjata dan aliansi militer, citra "*long peace*", *like symphony orchestra* dan berorientasi pada *territorial integrity, sovereignty, national unity, political independence, influence and engagement*.

Namun demikian, pengertian bahaya ancaman keamanan ini telah bergeser ke isu lingkungan hidup, demokratisasi, HAM dan kemanusiaan lainnya. Dalam istilah UNDP tahun 1994 seperti yang dikuti oleh Muladi<sup>50</sup>, "*new threat patterns*" berupa ancaman bahaya yang bersifat non-tradisional, non-konvensional, asimetrik, "*human security*", "*people centered view of security*", dominasi oleh "*non-state actors*", "*non-military security*", orientasi pada kesejahteraan manusia dalam arti luas, membutuhkan partisipasi pemerintah dan organisasi regional, internasional dan NGO serta memberdayakan masyarakat, citra "*long war*", *like jazz playing*, (keamanan di bidang ekonomi, makanan, kesehatan, lingkungan hidup, personal, masyarakat dan keamanan politik).

Dalam melakukan kerjasama, negara-negara sekawasan bisa memilih salah satu antara kedua pengertian keamanan tersebut atau memilih kedua-duanya. Tentunya, kerjasama militer ASEAN sudah mulai menuju ke arah melakukan kerjasama keamanan dalam arti kedua konteks pengertian tersebut. Kerjasama militer sesama negara ASEAN di bidang

---

<sup>49</sup>Diambil dari Muladi. 2011. "Pemanfaatan Kerjasama Keamanan Melalui Pertukaran Informasi Pengetahuan Guna Meningkatkan Kapabilitas Dan Kinerja Aparat Hukum Dalam Rangka Ketahanan Nasional", Makalah disampaikan dalam Ceramah di depan Peserta PPRA-46 Lemhannas RI 2011 pada tanggal 29 September 2011.

<sup>50</sup>*ibid.*

kemanusiaan, pada masa mendatang nampaknya akan lebih strategis untuk dilakukan guna menghindari adanya anggapan bahwa ASEAN melakukan kerjasama militer yang menjurus kepada *Collective Security/Collective Defense (CD)*. Jika ada anggapan dari negara-negara lain bahwa ASEAN menjurus pada pemebtnukan CD, maka hal itu tidak akan menguntungkan posisi ASEAN dalam kaitannya kerjasama ASEAN dengan negara-negara lain dalam bidang non keamanan pertahanan.

Pilhan untuk melakukan kerjasama dalam bidang keamanan humanis ini bukanlah tanpa alasan, paling tidak, hal ini didukung oleh realitas yang menunjukkan bahwa kondisi geografis negara-negara ASEAN sangat rawan terjadinya bencana alam. Oleh karenanya, peningkatan kemampuan militer masing-masing negara ASEAN dalam penanggulangan bencana alam mutlak diperlukan. Kerjasama militer untuk meningkatkan pemahaman manajerial penanganan bencana alam juga diperlukan oleh negara-negara ASEAN. Keterampilan manajerial penaganganan pasca bencana merupakan hal yang sangat penting dikuasai oleh kalangan meiliter. Biasanya, sering muncul masalah-masalah sosial pada saat pasca bencana, yang juga cenderung memiliki potensi kerawanan dan dapat mengganggu stabilitas keamanan.

Perkembangan TIK sudah seharusnya dimanfaatkan oleh kalangan militer ASEAN dalam melakukan kerjasama. Oleh karenanya, Indonesia harus mengikuti perkembangan teknologi militer dunia yang semakin canggih dalam setiap implementasinya. Hal ini penting mengingat luas wilayah Indonesia yang harus dilindungi. Peningkatan kuantitas dan kualitas alutsista dan pengetahuan tentang ketahanan nasional non militer juga perlu dilakukan dalam setiap kerjasama yang dilakukan. Dengan demikian, militer Indonesia dapat menjadi kekuatan yang disegani dan memiliki pengaruh (*influence*) di kawasan regional ASEAN. Dengan kemampuan seperti itu, peranan Indonesia dapat dioptimalkan dalam kerjasama militer negara-negara ASEAN.

## 25. Kebijakan

Sebagai rumusan kebijakan yang perlu ditempuh terkait dengan optimalisasi peranan Indonesia dalam kerjasama militer negara-negara ASEAN guna memantapkan politik dan keamanan regional dalam rangka ketahanan nasional, dapat disebutkan sebagai berikut, yakni **“terwujudnya optimalisasi peranan Indonesia dalam kerjasama militer negara-negara ASEAN melalui penetapan batas-batas wilayah negara Indonesia secara tuntas, meningkatkan alokasi anggaran pertahanan negara secara proporsional, menciptakan stabilitas politik dalam negeri dan meningkatkan kemampuan manajemen bencana alam di kalangan militer ASEAN guna memantapkan stabilitas politik dan keamanan regional dalam rangka ketahanan nasional”**.

## 26. Strategi.

Terkait dengan kebijakan untuk mengoptimalkan peranan Indonesia dalam kerjasama militer negara-negara ASEAN guna memantapkan stabilitas politik dan keamanan regional dalam rangka ketahanan nasional diperlukan 4 (empat) strategi yaitu :

### a. Strategi-1 : Menyelesaikan Secara Tuntas Masalah Batas Negara Indonesia dengan Negara-negara Tetangga

Dalam **UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, pasal 7 ayat (2).**

**b. poin 4**, disebutkan bahwa tugas pokok TNI dilakukan untuk **mengamankan wilayah perbatasan**. TNI akan mengalami kesulitan dalam mengamankan perbatasan jika batas-batas negara Indonesia dengan negara tetangga belum diselesaikan dengan tuntas. Kondisi batas negara yang belum jelas dapat menimbulkan dampak psikologis yang kontra produktif. Untuk mengambil tindakan, tentu akan muncul dilema, mengingat tindakan yang tidak tepat dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak menguntungkan, baik bagi institusi TNI di dalam negeri, maupun bagi negara Indonesia di mata internasional.



Tuntasnya masalah perbatasan sangat penting bagi optimalisasi kerjasama militer, mengingat berbagai persoalan dan konflik yang terjadi selama ini lebih banyak dilatarbelakangi oleh masalah perbatasan. Perbatasan antara Malaysia dan Thailand masih bermasalah. Perbatasan antara Malaysia dan Indonesia juga masih belum tuntas. Demikian juga dengan perbatasan antara beberapa negara ASEAN yang lain, masih menjadi perdebatan di antara negara-negara ASEAN. Dengan diselesaikannya masalah perbatasan secara tuntas antara Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya, dapat mengeliminir gesekan-gesekan yang tidak perlu. Pihak militer Indonesia juga akan lebih mudah melakukan kerjasama militer dengan negara-negara ASEAN jika masalah perbatasan ini dapat diselesaikan secara tuntas.

Ada beberapa cara untuk menyelesaikan masalah perbatasan, yakni dengan perundingan bilateral atau melibatkan pihak lain, diantaranya menyerahkan sengketa perbatasan ke forum Mahkamah Internasional. Namun demikian, semua pihak harus menerima dengan lapang dada, apapun hasil dari penyelesaian yang ditempuh. Hal ini penting untuk meningkatkan wibawa masing-masing negara, termasuk negara Indonesia di mata negara-negara ASEAN lainnya. Penetapan batas negara secara tuntas dapat menghindari konflik yang mengancam mantapnya stabilitas politik dan keamanan regional yang selama ini sering muncul di permukaan.

#### **b. Strategi-2 : Meningkatkan Alokasi Anggaran Pertahanan Indonesia**

Jika dibandingkan dengan anggaran militer/pertahanan negara-negara ASEAN lainnya, maka dapat dilihat bahwa anggaran pertahanan Indonesia relatif sangat minim. Berdasarkan prosentase PDB<sup>51</sup>, anggaran pertahanan Indonesia hanya mencapai 1,2% (2007), menurun menjadi 1% (2008) dan 0,9% (2009), yang memiliki luas wilayah 1.904,569 KM<sup>2</sup> dan jumlah penduduk berkisar pada 225-230an juta. Sedangkan Malaysia 2,1% (2007), 2% (2008 dan 2009) dengan

---

<sup>51</sup>Data ini diolah dari berbagai sumber.

luas wilayah 329.847 KM<sup>2</sup> dan jumlah penduduk berkisar pada angka 27an juta. Sementara Singapura memiliki anggaran belanja militer 3,7% (2007), naik menjadi 3,9% (2008 dan 2009) dengan luas wilayah hanya 710,2 KM<sup>2</sup> dan jumlah penduduk di seputaran angka 5 jutaan. Secara nominal pun, anggaran militer Singapura mencapai dua kali lipat dari angka nominal anggaran pertahanan Indonesia. Untuk anggaran pertahanan Thailand berjumlah 1,3% (2007), naik menjadi 1,9% (2008 dan 2009) dengan luas wilayah 514.000 KM<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sekitar 64 jutaan. Brunei Darussalam memiliki anggaran pertahanan 2,6% (2007), naik menjadi 3,9% (2008) dan 3,1% (2009) dengan luas wilayah 5.765 KM<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sekitar 381 ribuan. Vietnam memiliki anggaran militer 2,5% (2007), 2,4% (2008) dan naik lagi menjadi 2,5% (2009) dengan luas wilayah 331.689 KM<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sekitar 85 jutaan. Hanya Philipina dan Laos yang berada di bawah anggaran pertahanan Indonesia. Itupun tidak sebanding jika dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk Indonesia. Sementara anggaran pertahanan Myanmar dan Kamboja tidak terdata. Mengingat Myanmar dikuasai oleh pemerintahan Junta Militer, anggaran pertahanannya juga cenderung lebih besar dari pada anggaran pertahanan Indonesia.

Proporsionalitas anggaran pertahanan negara ini penting dilakukan mengingat luas wilayah dan jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar. Selain itu, optimalisasi peranan hanya dapat dilakukan dengan cara menyesuaikan anggaran pertahanan agar kekuatan militer Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara-negara lain. Kenaikan anggaran pertahanan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas persenjataan dan peralatan militer. Bisa saja, anggaran pertahanan ditambah dari proporsi anggaran pendidikan yang sekarang telah mencapai 20% APBN dan setiap tahun tidak terserap semuanya. Pendidikan juga dapat didefinisikan sebagai pendidikan bagi personel militer dan juga riset tentang modernisasi alutsista.

Kenaikan alokasi anggaran dapat mendukung pengembangan industri strategis perlengkapan dan peralatan militer. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap negara lain dalam memenuhi kebutuhan peralatan militer. Selama ini, Indonesia belum memiliki kemandirian dalam pengadaan dan perawatan peralatan dan perlengkapan militer karena tidak memiliki anggaran yang memadai untuk membangun industri strategis. Kenaikan anggaran militer dapat menunjang modernisasi peralatan militer, meningkatkan kuantitas peralatan, menambah jumlah personel dan meningkatkan profesionalitas mereka. Dengan demikian, militer Indonesia dapat berkiprah secara optimal dalam kerjasama dengan negara-negara ASEAN, selalu siap siaga dengan kekuatan penuh kapan pun diperlukan. Negara AS menerapkan strategi militer yang sangat efektif dalam upaya mencapai kepentingan nasionalnya yang didukung oleh alokasi anggaran pertahanan yang sangat memadai. Oleh karenanya, AS selalu memperoleh pengaruh di dunia internasional.

**c. Strategi-3 : Menciptakan Stabilitas Politik Dalam Negeri**

Reformasi tahun 1998 telah membawa Indonesia ke dalam suasana politik yang tidak menentu. Kekuasaan eksekutif yang dikepalai oleh Presiden sering menjadi tidak efektif tatkala berhadapan dengan parlemen atau bahkan dengan Bupati/Walikota di daerah. Hal ini tidak terlepas dari aturan perundang-undangan yang mengatur tentang kedudukan anggota DPR RI dan juga adanya UU tentang otonomi daerah, yang memberi kekuasaan otonom kepada Bupati/Walikota sebagai Kepala Daerah.

Selain itu, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemilu, baik pemilu presiden/wapres, parlemen dan juga pemilu kepala daerah yang ditetapkan secara langsung, telah banyak menimbulkan konflik horizontal di masyarakat. Kondisi ini diperparah dengan belum tumbuhnya kedewasaan para dalam berpolitik, baik di pusat maupun di daerah. Para elit politik belum memiliki mental untuk kalah dalam semua level pemilihan. Biasanya, pihak yang kalah selalu berusaha

untuk merongrong kekuasaan pihak yang menang. Ketidakpuasan hasil pemilu juga sering dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dugaan adanya kecurangan. Ketidakpuasan atas kekalahan juga tidak jarang diikuti dengan tindakan *destruktif* para pendukung calon yang kalah.

Pada masa yang akan datang, pihak-pihak yang terkait, terutama supra struktur dan infra struktur perlu memikirkan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemilu dan pemilu. Selain itu, infra struktur pun harus lebih banyak terlibat dalam upaya memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang pentingnya kedewasaan berdemokrasi. Jika hal ini tidak dilaksanakan, maka dapat dipastikan stabilitas politik Indonesia akan semakin tidak menentu dan dapat berdampak pada instabilitas politik dan keamanan regional.

Stabilitas politik dalam negeri sangat penting untuk mendukung upaya optimalisasi peranan Indonesia dalam kerjasama militer negara-negara ASEAN guna memantapkan politik dan keamanan regional. Alasannya, *pertama*, kualitas diplomasi Indonesia di forum regional ditentukan oleh kualitas pemerintahan. Jika kondisi dalam negeri Indonesia selalu diwarnai dengan instabilitas politik, maka sulit bagi Indonesia untuk berperan dalam kancah internasional atau regional karena negara lain akan melihat bahwa Indonesia tidak bisa mengurus urusan dalam negerinya. Dalam hal ini, kiranya perlu melihat bagaimana stabilitas politik di AS, yang dapat mengeksport ideologinya ke berbagai negara di dunia. Saat ini, Indonesia tidak memiliki pola kepemimpinan yang ideal dalam mengelola negara.<sup>52</sup> Rekrutmen politik yang serba *instant* telah melahirkan pemimpin yang tidak akomodatif.

*Kedua*, instabilitas politik dalam negeri akan dapat memancing unsur-unsur kekuatan yang ada di dalam negeri bekerjasama dengan pihak-pihak asing di kawasan regional ASEAN dalam memperkeruh suasana, misalnya dengan terjadinya kejahatan lintas negara,

---

<sup>52</sup>Tentang Ciri-ciri pemimpin yang ideal dapat dilihat dalam Pokja Kepemimpinan, *Materi Pokok BS Kepemimpinan*, Jakarta: Lemhannas RI, 2011.

penyelundupan senjata, pelatihan teroris dan lain-lain. Kewaspadaan Nasional harus dimiliki oleh setiap komponen bangsa agar dapat mengantisipasi TAHG, yang datangnya dari dalam maupun dari luar<sup>53</sup>. Selain itu, instabilitas politik dalam negeri akan menghabiskan energi elemen bangsa, termasuk komponen militer karena semua kemampuannya terkuras untuk mengurus persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak perlu dilakukan, misalnya jika terjadi agitasi dan provokasi di wilayah perbatasan. Untuk itulah, stabilitas politik dalam negeri merupakan salah satu cara yang harus diciptakan oleh Indonesia agar dapat disegani oleh negara-negara kawasan ASEAN.

**d. Strategi 4 : Meningkatkan Pemahaman Manajemen Penanggulangan Bencana Alam Di Kalangan Militer ASEAN**

Pengertian keamanan telah berkembang ke arah keamanan humanis, non tradisional.<sup>54</sup> Keamanan humanis bukanlah keamanan yang memiliki dimensi perang, melainkan diartikan sebagai keamanan yang diperoleh masyarakat terhadap gangguan alam. Selama ini, kekuatan militer sering dimanfaatkan untuk membantu masyarakat jika terjadi bencana alam. Kondisi alam regional ASEAN yang rentan dengan bencana alam membuat negara-negara ASEAN harus selalu siap menghadapi kemungkinan terjadinya bencana alam seperti banjir, angin puting beliung, gunung berapi yang meletus, gempa bumi, tsunami, kecelakaan transportasi darat, laut dan udara serta bencana lainnya.

Dari segi peralatan dan kemampuan teknis, personel militer memiliki kemampuan untuk menjangkau daerah-daerah yang tidak dapat dijangkau oleh masyarakat biasa. Namun, kadangkala kemampuan teknis tersebut tidak diikuti oleh kemampuan dalam mengelola kondisi sosial masyarakat pasca bencana, misalnya terapi traumatik yang dialami oleh masyarakat akibat bencana. Atau

---

<sup>53</sup>Lebih lanjut tentang kewaspadaan nasional dapat dibaca dalam Pokja Kewaspadaan Nasional, *Materi Pokok BS Kewaspadaan Nasional*, Jakarta: Lemhannas RI, 2011.

<sup>54</sup>Dalam Muladi, *op-cit*.

bagaimana mengelola kelangsungan pendidikan anak-anak korban bencana alam. Kemampuan manajerial seperti itu perlu dimiliki oleh kalangan TNI, khususnya bagi level komandan/perwira. Saat ini memang telah ada upaya ke arah peningkatkn kemampuan manejerial kebencanaan dengan mengikuti *workhshop* atau pelatihan-pelatihan, namun intensitas dan jumlah personel yang terlibat masih sangat minim untuk jangkauan wilayah yang sangat luas dan jumlah penduduk yang sangat banyak.

Dengan memiliki kemampuan manajerial kebencanaan oleh kalangan militer Indonesia, maka keterlibatan militer Indonesia dalam misi kemanusiaan, khususnya penanggulangan bencana alam yang mungkin terjadi di kawasan ASEAN akan dapat dilakukan secara optimal. Keterlibatan militer Indonesia dalam menangani bencana alam juga dapat berpengaruh terhadap situasi politik dan keamanan regional dengan adanya rasa hormat bangsa lain terhadap kemampuan militer Indonesia dalam menanggulangi bencana alam. Sehingga, peranan Indonesia dalam kerjasama militer negara-negara ASEAN akan dapat dioptimalkan guna memantapkan stabilitas politik dan keamanan regional dalam rangka ketahanan nasional.

## 27. Upaya

Berbagai upaya untuk merealisasi keempat strategi tersebut harus dilakukan oleh banyak pihak dengan melakukan hal-hal yang kongkret seperti berikut :

### a. Upaya untuk mewujudkan Strategi-1, yakni Menyelesaikan Secara Tuntas Masalah Batas Negara Indonesia dengan Negara-negara Tetangga adalah dengan cara :

- 1). Presiden RI sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan melakukan pertemuan secara intensif kepada seluruh semua Kapala Negara dan atau kepala Pemerintahan negara-negara ASEAN yang isinya khusus membicarakan penuntasan batas-batas negara Indonesia dengan negara-negara tetangga.

- 2). Ketua MPR RI melakukan pembicaraan khusus secara bilateral dengan pimpinan lembaga sejenis di semua negara-negara ASEAN untuk membahas masalah batas-batas negara Indonesia dengan negara-negara tetangga sesama ASEAN.
- 3). Ketua DPR RI melakukan pembicaraan dengan ketua parlemen negara-negara ASEAN yang membahas penuntasan batas-batas negara, termasuk kemungkinan untuk memanfaatkan forum IPU (*International Parliamentary Union*).
- 4). Presiden RI menunjuk Duta Besar Keliling yang bertugas melakukan lobby tingkat tinggi guna membicarakan masalah batas negara Indonesia dengan negara-negara tetangga sesama ASEAN.
- 5). Menteri Luar negeri RI melakukan pertemuan-pertemuan secara khusus dengan menteri Luar negeri negara-negara ASEAN guna mencari solusi untuk menuntaskan masalah batas-batas negara Indonesia dengan negara-negara tetangga.
- 6). Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI membentuk tim khusus yang berfungsi sebagai tim asistensi untuk membantu Duta Besar Keliling dalam melaksanakan tugasnya.
- 7). Kemenlu RI, Kemendagri, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kemenhan bekerjasama menetapkan kembali patok-patok batas-batas negara RI dengan negara-negara tetangga yang berdasarkan ketentuan dalam hukum internasional, misalnya ketentuan ZEE dan UNCLOS.
- 8). Kemenlu dan Kemenkumham membuat berbagai *planning* untuk menyelesaikan masalah batas-batas negara, termasuk skenario membawa ke Mahkamah Internasional, jika pembicaraan bilateral tidak mencapai kesepakatan.
- 9). Kemenlu, Kemendagri dan Kemenag bekerjasama dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat untuk melakukan sosialisasi tentang batas-batas negara kepada masyarakat yang tinggal di perbatasan.

- 10). Kemendagri dan TNI bekerjasama dalam melakukan sosialisasi tentang bela negara kepada masyarakat, terutama masyarakat pantai atau yang tinggal di wilayah-wilayah terdepan NKRI. Hal ini penting dilkakukan mengingat masyarakat tersebut merupakan komponen bangsa yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam menjaga perbatasan NKRI dengan negara-negara tetangga.
- 11). Kemendagri dan kementerian Pekerjaan Umum mengalokasikan anggaran khusus bagi pembangunan wilayah perbatasan, baik pembangunan infra struktur maupun pembangunan pola sikap masyarakatnya. Pembangunan infra struktur akan dapat mendukung pembangunan ekonomi, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**b. Upaya mewujudkan Strategi-2, yakni Meningkatkan Alokasi Anggaran Pertahanan Indonesia** adalah dengan cara :

- 1). Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Panglima TNI melakukan evaluasi terhadap renstra dan renop tentang pertahanan yang sudah ada, termasuk menetapkan postur TNI yang ideal berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk RI yang harus dilindungi agar memudahkan pihak lain (misalnya, anggota DPR RI) memahami kebutuhan anggaran pertahanan.
- 2). Kemenhan dan DPR RI perlu meninjau kembali alokasi anggaran pertahanan yang ditetapkan dalam APBN dan APBNP, agar sesuai dengan kebutuhan pertahanan yang ideal untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Alokasi anggaran yang selama ini berjalan sangat minim dibandingkan dengan kebutuhan minimal TNI dalam menjalankan tugasnya.
- 3). Panglima TNI membuat skala prioritas pengembangan pertahanan, termasuk penambahan perlengkapan dan peralatan militer yang modern serta pengembangan personel yang profesional dalam menggunakan peralatan dan perlengkapan.



- 4). Panglima TNI mengajak anggota DPR RI untuk mengikuti latihan bersama atau kerjasama militer lainnya di lingkup ASEAN dengan tujuan agar anggota DPR RI dapat membandingkan kondisi peralatan dan perlengkapan militer Indonesia yang sangat minim dalam kerjasama dengan negara-negara ASEAN.
- 5). Kemenhan dan Panglima TNI membangun komunikasi yang lebih intensif kepada anggota DPR RI untuk mempermudah memberikan pemahaman bahwa peningkatan alokasi anggaran pertahanan sangat penting untuk menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang berwibawa di lingkup ASEAN.
- 6). Panglima TNI melakukan komunikasi intensif dengan kelompok kepentingan yang terkait dengan kebutuhan peralatan dan perlengkapan pertahanan agar ikut meyakinkan anggota DPR RI tentang kebutuhan Indonesia akan pertahanan modern dalam rangka menciptakan ketahanan nasional yang tangguh. Terkait dengan hal ini, diharapkan akan tumbuh kelompok kepentingan yang kuat dan selalu mendukung pentingnya meningkatkan kemampuan perlengkapan dan peralatan militer bagi kepentingan Indonesia. *Military Industrial Complex* (MIC) di AS barangkali dapat dijadikan model yang mungkin diterapkan di Indonesia.
- 7). Panglima TNI bekerjasama dengan Industri Strategis di dalam negeri guna membangun kemandirian dalam memproduksi perlengkapan dan peralatan pertahanan yang dibutuhkan, termasuk untuk perawatannya. Dengan cara itu, Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS) juga dapat mendukung kenaikan anggaran pertahanan Indonesia.
- 8). Kemenhan, Panglima TNI dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan koordinasi untuk membicarakan kemungkinan alokasi biaya pendidikan bagi personel militer yang bersumber dari anggaran pendidikan.

**c. Upaya mewujudkan Strategi-3, yakni Menciptakan Stabilitas Politik Dalam Negeri** adalah dengan cara :

- 1). Kemendagri dan DPR melakukan evaluasi dan revisi terhadap seluruh UU Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Semua UU tersebut terkait dengan rekrutmen politik dalam pemerintahan di Indonesia. Sejak reformasi, rekrutmen politik yang dilakukan masih mengandung unsur-unsur yang emosional. Hal ini tidak terlepas dari sistem rekrutmen yang berlaku, berdasarkan UU tentang pemilihan umum yang ada. Hasilnya dapat dilihat bahwa pemimpin pemerintahan, baik di pusat, apalagi di daerah banyak yang tidak mengakomodasikan kepentingan rakyat. Sistem pemilihan langsung juga banyak menimbulkan konflik horizontal, yang berakibat pada instabilitas politik.
- 2). Presiden dan DPR perlu meninjau kembali semua UU yang terkait dengan Otonomi Daerah. UU tentang Otonomi Daerah memiliki konsekuensi berkurangnya kekuasaan pusat untuk mengontrol pemerintahan di daerah. Hal ini mengakibatkan kekuasaan pemerintah pusat menjadi tidak efektif dalam upaya menjalankan semua kebijaksanaan yang diambil. Dengan demikian, muncul instabilitas dalam proses politik di semua level pemerintahan.
- 3). Kemendagri dan DPR RI meninjau kembali UU tentang Partai Politik (Parpol). UU tentang Parpol ini juga memberikan kontribusi terhadap sistem rekrutmen politik di pemerintahan. Seharusnya, dalam UU ini juga perlu diperjelas tentang rekrutmen politik yang dilakukan oleh Parpol, termasuk tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menduduki jabatan politik tertentu. Dengan demikian, elit politik yang dihasilkan tidak seperti kebanyakan elit politik saat ini, yakni tidak memiliki wawasan kebangsaan dalam menyelesaikan berbagai persoalan.
- 4). Kemendagri dan DPR RI mengevaluasi UU yang terkait dengan Organisasi Masyarakat (ormas), agar memiliki wawasan

kebangsaan dalam menjalankan setiap aktivitasnya, tidak hanya mengedepankan kepentingan kelompoknya saja, apalagi dengan cara menggunakan kekerasan untuk menekan kelompok lain yang tidak sejalan.

- 5). Aparat penegak hukum (Lembaga Kepolisian, Lembaga Kejaksaan dan Lembaga Kehakiman) yang termasuk dalam *criminal justice system* dalam negara Indonesia, harus menegakkan hukum dengan tegas dan adil. Hal ini penting untuk menghindari munculnya rasa ketidakadilan dalam masyarakat yang dapat berakibat pada tindakan anarkis. Tindakan anarkis merupakan salah satu ciri sistem politik yang tidak stabil. Selain itu, pengalaman negara-negara maju seperti AS dan negara-negara Eropa Barat, reformasi politik yang dapat menghasilkan pemerintahan yang stabil dan demokratis selalu dimulai dari reformasi hukum dan penegakan hukum bagi kepentingan semua masyarakat.
- 6). Kemenkumham dan DPR membuat UU yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan uji materi terhadap semua peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan tanpa terlebih dahulu diminta oleh masyarakat.
- 7). Tokoh agama (Toga) dan Tokoh Masyarakat (Tomas) yang menjadi pemimpin organisasi masyarakat keagamaan dan organisasi masyarakat umum, perlu melakukan sosialisasi tentang wawasan kebangsaan kepada semua anggota atau simpatisan organisasi mereka, agar dapat ikut menciptakan suasana yang kondusif bagi Indonesia di lingkup ASEAN.
- 8). Kemenag membentuk forum koordinasi dan kerjasama pengawasan terhadap paham-paham fundamental agama yang berkembang saat ini. Forum koordinasi dan kerjasama ini beranggotakan para tokoh-tokoh nasional yang terkait, seperti Menteri Agama, Menko Polhukam, Kepala BIN, para Tokoh

Agama dan Tokoh-tokoh Masyarakat di tingkat pusat. Forum koordinasi dan kerjasama ini memfokuskan aktivitasnya pada upaya mengamati dan menganalisa fenomena terjadinya kecenderungan penyebaran paham-paham yang ekstrim berdasarkan agama tertentu yang berkembang secara nasional. Jika penyebaran paham-paham ekstrim ini dianggap dapat mengancam ketahanan nasional dan membahayakan stabilitas politik atau mengganggu keamanan nasional, maka forum ini dapat menyusun rencana tindakan dan menjadi bahan laporan dari kementerian agama kepada presiden.

- 9). Pemerintah Propinsi (Pemprop) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) atau Pemerintah Kota (Pemkab) membentuk forum koordinasi dan kerjasama pengawasan terhadap kemungkinan gerakan ekstrim, baik yang berdasarkan agama maupun ideologi lain yang tidak sesuai dengan Pancasila. Biasanya, paham-paham yang ekstrim ini sering melakukan aktivitas mereka dengan cara yang anarkis. Tindakan anarkis tersebut dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan di wilayah NKRI.
- 10). Kemendagri, Pemprop dan Pemkab/Pemkot yang memiliki wilayah berbatasan langsung dengan negara tetangga melakukan sosialisasi pentingnya wawasan kebangsaan untuk mengeliminir kejahatan lintas negara yang dapat menimbulkan kerawanan di masyarakat perbatasan.

**d. Upaya untuk mewujudkan Strategi-4, yakni Meningkatkan Pemahaman Manajerial Penanggulangan Bencana Alam Di Kalangan Militer ASEAN** adalah dengan cara :

- 1). Kemenhan bekerjasama dengan Badan *Search And Rescue* Nasional (Basarnas) guna mengadakan pelatihan rutin tentang penanggulangan bencana alam dengan melibatkan seluruh komponen matra dalam TNI.
- 2). Kemenhan dan Panglima TNI bekerjasama dengan Kemendagri menyelenggarakan pelatihan terkait dengan manajemen bencana

alam bagi personel TNI, khususnya menyelesaikan dampak sosial sebagai akibat terjadinya bencana alam.

- 3). Kemenhan, Kemendagri dan Panglima TNI bersama DPR RI (komisi terkait) membuat UU tentang *Double Track Managemen* (DTM) untuk menjalankan roda pemerintahan dalam keadaan darurat bencana alam di wilayah NKRI. DTM diperlukan mengingat saat terjadi bencana alam, kondisi wilayah biasanya tidak normal, yang berakibat pelayanan masyarakat juga tidak normal. Dalam situasi tersebut, diperlukan manajemen di luar *track* pada umumnya.
- 4). Panglima TNI membuat program secara rutin terkait dengan pelatihan tentang manajemen penanggulangan bencana alam kepada semua personel mulai level perwira. Hal ini penting dilakukan untuk menambah keterampilan dan kemampuan para perwira TNI dalam melaksanakan aktivitas kebencanaan jika terjadi bencana alam.
- 5). Panglima TNI memperbanyak rekrutmen personel yang berlatar belakang ilmu-ilmu sosial untuk menangani masalah sosial yang timbul akibat terjadinya bencana alam. Dengan cara ini, personel militer tidak hanya menguasai keterampilan militer saja, melainkan juga dapat menangani masalah-masalah sosial di masyarakat pasca bencana.
- 6). Panglima TNI mengirimkan personel TNI untuk mempelajari manajemen bencana alam ke berbagai negara dalam rangka memperkaya wawasan prajurit TNI terkait dengan penanggulangan bencana alam.
- 7). Kemenhan bekerjasama dengan lembaga sejenis dalam lingkungan negara-negara ASEAN untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang manajemen penanggulangan bencana alam dengan cara tukar menukar personel untuk mengikuti latihan.
- 8). Kemenhan dan DPR RI membuat UU yang mempertegas posisi teritorial TNI di daerah-daerah, yang sewaktu-waktu dapat dimobilisasi untuk menanggulangi bencana alam.

10. Kemenhan dan Panglima TNI menginisiasi kekuatan militer negara-negara ASEAN untuk mengadakan pelatihan bersama tentang penanggulangan bencana alam agar dapat digunakan setiap saat diperlukan oleh negara-negara ASEAN yang membutuhkan.
11. Kemenhan dan Panglima TNI menginisiasi kerjasama manajemen penanggulangan bencana alam bagi personel TNI dengan beberapa negara maju yang juga sering mengalami bencana, seperti Jepang, Australia dan AS.
12. Kemenhan bekerjasama dengan Kemendikbud dan LIPI melakukan riset tentang bencana alam di beberapa wilayah NKRI. Hasil riset ini dapat digunakan sebagai acuan untuk mengadakan pelatihan manajemen penanggulangan bencana alam, baik di dalam negeri maupun melibatkan kekuatan militer negara-negara ASEAN.

=====

## **BAB VII**

### **P E N U T U P**

#### **28. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang diangkat dalam TASKAP ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Salah satu faktor untuk mewujudkan ketahanan nasional Indonesia yang tangguh adalah dengan stabilitas politik dan keamanan regional yang mantap di kawasan ASEAN. Stabilitas politik dan keamanan regional yang mantap akan dapat mempengaruhi kondisi politik dan keamanan dalam negeri. Kondisi politik dan keamanan dalam negeri yang stabil memungkinkan bangsa Indonesian untuk membangun, baik fisik maupun mental bangsa Indonesia. Pada akhirnya, kondisi yang demikian dapat mencapai tujuan dan cita-cita nasional, yakni kesejahteraan rakyat.
- b. Untuk memantapkan stabilitas politik dan keamanan regional, Indonesia perlu meningkatkan atau mengoptimalkan peranannya dalam kerjasama militer sesama negara-negara ASEAN. Dengan optimalisasi peranan dalam kerjasama militer dengan negara-negara ASEAN, Indonesia dapat menjadi negara yang dihormati di lingkungan ASEAN. Pengaruh yang dimiliki Indonesia atau daya tawar yang tinggi bagi Indonesia dengan negara-negara ASEAN, dapat mempermudah menyelesaikan berbagai persoalan sesama negara ASEAN.
- c. Optimalisasi peranan Indonesia dalam kerjasama militer ASEAN terkendala dengan adanya faktor-faktor psikologis, diantaranya masih belum tuntasnya masalah batas-batas wilayah negara Indonesia dengan negara-negara tetangga di lingkup ASEAN. Kondisi seperti itu cenderung menimbulkan saling curiga dalam diri militer masing-masing negara, sehingga mempersulit optimalisasi peranan Indonesia dalam kerjasama yang akan dilakukan.
- d. Optimalisasi peranan Indonesia juga terkendala dengan rendahnya alokasi anggaran pertahanan Indonesia, yang mengakibatkan Indonesia tidak maksimal melakukan inisiatif terkait dengan kerjasama militer.

Indonesia tidak dapat secara optimal berperan karena tidak memiliki perlengkapan dan peralatan pertahanan yang memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas.

- e. Instabilitas politik dalam negeri Indonesia telah mempengaruhi upaya optimalisasi peranan Indonesia dalam kerjasama militer negara-negara ASEAN. Negara lain memandang bahwa Indonesia belum dapat menyelesaikan berbagai macam masalah dalam negerinya, misalnya kisruh pemelukada atau sering terjadinya tindakan anarkis di dalam negeri. Hal ini menyulitkan diplomasi para pemimpin militer Indonesia terhadap negara-negara ASEAN.
- f. *Influence* atau pengaruh hanya dapat diperoleh dengan kekuatan nasional yang efektif, terutama kesiapan militer dan kualitas pemerintahan Indonesia dalam pandangan negara-negara ASEAN.
- g. Personel TNI perlu mengembangkan keterampilan teknis manajemen penanggulangan bencana alam agar dapat mengoptimalkan peranannya dalam kerjasama militer negara-negara ASEAN yang rawan bencana alam.

## **29. Saran**

- 1). Presiden RI perlu memfokuskan menyelesaikan masalah perbatasan negara Indonesia dengan negara-negara tetangga di regional ASEAN dengan target waktu yang disepakati bersama DPR RI.
- 2). Presiden RI perlu memiliki sikap konsisten untuk berpihak kepada kepentingan kebutuhan alokasi anggaran pertahanan Indonesia untuk mencapai postur TNI yang ideal dan proporsional dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI sesuai dengan UU TNI.
- 3). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan harus mengevaluasi kurikulum yang terkait dengan tujuan untuk menumbuhkan sikap cinta tanah air, baik melalui pelajaran di intra kurikuler maupun pada aktivitas ekstra kurikuler di semua jenjang pendidikan di Indonesia.



- 4). Menteri Luar Negeri harus mewajibkan aparat diplomat dari Kemenlu mengikuti pendidikan tentang wawasan kebangsaan untuk menambah pemahaman bela negara saat ditugaskan di luar negeri.
- 5). Selain difikirkan oleh Presiden, Panglima TNI perlu memikirkan berbagai cara agar alokasi anggaran pertahanan dapat dinaikkan secara proporsional, misalnya dengan bekerjasama dengan kelompok kepentingan yang ada di dalam negeri.

=====



